

PERGERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM

Studi Historis tentang Eksistensi Persatuan Islam (Persis)
di Kabupaten Serang Propinsi Banten



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2004**

PERGERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM

Studi Historis tentang Eksistensi Persatuan Islam (Persis)
di Kabupaten Serang Propinsi Banten

HADIAH 13-12-04

Proy. Pemamf. Kebudayaan

BKSNP BANDUNG

W/ ASDER TRADISI

Oleh :

Idr 264

Herry Wiryono

Heru Erwantoro

Euis Thresnawati

Endang Nurhuda

Yuzar Purnama

Penyunting :

S. Dloyana Kusumah

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2004**

KATA PENGANTAR

Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berkesempatan untuk menerbitkan buku berjudul :

1. Fungsi Keluarga dalam Penanaman Nilai-nilai Budaya pada Masyarakat Betawi di DKI Jakarta;
2. Pergerakan Pembaharuan Islam, Studi Historis tentang Eksistensi Persatuan Islam (Persis) di Kabupaten Serang Propinsi Banten;
3. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan, Studi Tentang Tantangan Kendala dan Peluang Keluarga Nelayan untuk Melepaskan Diri dari Belenggu Kemiskinannya;
4. Potensi Wisata di Daerah Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Naskah buku-buku tersebut merupakan hasil penelitian dan penulisan tim yang ditunjuk oleh Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Kami menyadari bahwa hasil penelitian yang dibukukan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai dasar penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Dengan terwujudnya usaha ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.

Akhir kata, mudah-mudahan penerbitan buku ini bermanfaat dalam usaha menggali serta melestarikan kebudayaan daerah memperkuat kebudayaan nasional serta menunjang pembangunan bangsa.

Bandung, November 2004

Pemimpin Proyek Pemanfaatan
Kebudayaan Daerah Jawa Barat,



Drs. Suwardi Alamsyah P.

NIP. 131 966 806

KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan (Deputi I), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Lembaga ini didirikan bukan berdasarkan **daerah administratif** melainkan **daerah kebudayaan**. Oleh karena itu, wilayah kerjanya lintas propinsi. Walaupun lembaga ini merupakan UPT Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan bukan berarti bahwa ia hanya melaksanakan sebagian tugas dari deputi tersebut, tetapi juga sebagian tugas dari Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala, terutama yang berkenaan dengan kesejarahan, dan sebagian tugas dari Deputy Bidang Seni dan Film, terutama yang berkenaan dengan kesenian. Berdasarkan tugas-tugas tersebut maka fungsinya adalah melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional (termasuk budaya spiritual), dan kesenian di wilayah kerjanya.

Di Indonesia, sampai saat ini, ada sebelas BKST yang satu dengan yang lainnya mempunyai penekanan pengkajian yang berbeda¹⁾. BKSNT Jabar, Banten, dan Lampung²⁾. Misalnya; ia mempunyai penekanan pada akulturasi, yaitu proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih bertemu dan saling mempengaruhi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 18). Ini bermakna bahwa kesejarahan dan kenilaitradisional, termasuk budaya spiritual, dan kesenian yang diamati dan atau dianalisis pada akhirnya dikaitkan dengan proses akulturasi.

Visi BKSNT Bandung adalah sebagai bank data dan informasi tentang kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian masyarakat etnik di wilayah kerjanya. Sedangkan misinya adalah melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian yang ada atau tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya dengan berbagai kegiatan seperti: pendataan, penelitian (pengkajian), perekaman, perlombaan, lawatan-lawatan yang berkenaan dengan kesejarahan

¹⁾ Kesebelas BKSNT itu adalah: (1) Nagroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang berkedudukan di Aceh penekanan pada kebudayaan Islam; (2) Sumatera Barat dan Bengkulu yang berkedudukan di Padang dengan penekanan pada kebudayaan matrilineal; (3) Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung (Babel) yang berkedudukan di Tanjungpinang dengan penekanan pada kebudayaan Melayu; (4) Jabar, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung yang berkedudukan di Bandung dengan penekanan pada akulturasi; (5) D.I. Yogyakarta, Jateng, dan Jatim yang berkedudukan di Yogyakarta dengan penekanan pada kebudayaan agraris; (6) Bali, NTB, dan NTT yang berkedudukan di Denpasar dengan penekanan pada pariwisata; (7) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang berkedudukan di Pontianak dengan penekanan pada pembauran; (8) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar dengan penekanan pada kebudayaan maritime; (9) Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Manado dengan penekanan pada akulturasi; (10) Maluku yang berkedudukan di Ambon dengan penekanan pada kebudayaan kepulauan; dan (11) Irian Jaya yang berkedudukan di Jayapura dengan penekanan pada kebudayaan meramu dan berburu.

BKSNT ini berkedudukan di Bandung. Oleh karena itu, lebih dikenal sebagai "BKSNT Bandung".

dan kebudayaan, seminar, diskusi, pendokumentasian dan sekaligus penyebarluasan data dan informasi yang berkenaan dengan kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan tugas, fungsi, serta misi yang diembannya, maka saya menyambut baik terbitnya laporan penelitian yang berjudul **“Pergerakan Pembaharuan Islam : Studi Historis tentang Eksistensi Persatuan Islam (Persis) di Kabupaten Serang Provinsi Banten”**, karena ini merupakan usaha penyebarluasan dan sekaligus pelestarian nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Banten.

Terwujudnya buku ini adalah berkat kerjasama berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya jika pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya terbitan ini.

Kami sadar sepenuhnya bahwa naskah ini di sana-sini banyak kekurangannya, dan karenanya masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya buku ini kami terima dengan lapang dada. Walaupun demikian, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Balai Kajian Sejarah dan,
Nilai Tradisional Bandung,



**SAMBUTAN ASDEP URUSAN TRADISI
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Masyarakat Indonesia adalah majemuk. Kemajemukan itu ditandai antara lain oleh beragamnya suku bangsa yang satu dengan yang lainnya menumbuhkembangkan budaya yang berbeda, dan agama. Berbicara tentang agama, maka Islam adalah agama yang di anut oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Agama yang masuk ke Indonesia melalui Sumatera Timur ini, dalam perkembangannya, mengalami berbagai penafsiran yang kemudian melahirkan pengelompokan. Di Kabupaten Serang misalnya, berdasarkan hasil muktamar Persis (2000), disana ada kecenderungan pengelompokan umat Islam menjadi tiga, yakni (1) kelompok yang berpegang pada warisan tradisi abad pertengahan, (2) kelompok cendekiawan muslim; (3) kelompok yang membandingkan ajaran dengan seluruh filsafat hidup.

Lepas dari berbagai penafsiran itu, yang jelas bahwa fenomena tentang adanya kecenderungan pengelompokan umat, yang notabene adalah sama-sama Islam, tercium di sana. Buku ini memang hanya menitikberatkan pada sepaik terjang kelompok yang ke tiga, yaitu kelompok yang ingin mengadakan pembaharuan terhadap ajaran-ajaran Islam (yang sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist). Namun demikian, bukan berarti bahwa kelompok-kelompok lainnya sama sekali tidak tersinggung. Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Buku ini menjadi sangat penting karena dalam penafsiran yang berbeda bukan hal yang mustahil terdapat benang merah yang mengacu pada kesatuan dan persatuan.

Terwujudnya buku ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung terwujudnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.



Asdep Urusan Tradisi,

Dra Fadjria Novari Manan

NIP. 131 252 251

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
 BAB II SERANG PUSAT ISLAM DI DAERAH BANTEN	 6
A. Agama Islam Masuk ke Serang Banten	6
B. Serang (Banten Lama) Sebagai Pusat Kekuatan Islam di Banten	9
C. Berdirinya Organisasi Islam di Banten	21
 BAB III PERANAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) SERANG DALAM PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN ISLAM DI SERANG	 23
A. Awal Mula Persatuan Islam (Persis)	24
B. Persatuan Islam (Persis) Serang	39
C. Kiprah Persatuan Islam (Persis) Serang Dalam Pembaharuan dan Pembangunan Umat Islam di Serang	 54
 BAB IV PENUTUP	 75
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama, banyak mendapatkan masukan bahkan kritik baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non Islam. Para pemerhati di luar Islam yang bersimpati umumnya berpandangan bagaimana agar Islam itu dapat menyesuaikan diri dengan semangat kebudayaan modern. Sedangkan dari kalangan interen mulai timbul kesadaran mereka dalam menilai kenyataan pemahaman dari praktek keagamaan kini ke arah usaha pemurnian karena menurut mereka Islam sebagai suatu ajaran agama dipahami bukan dalam bentuknya yang asli.

Selama ini, sebagian besar tokoh muslim (Islam) lebih banyak menyibukkan diri dan berjuang untuk pola pemikiran yang temporal. Jarang sekali adanya gerakan yang sifatnya membangun kembali dengan berusaha mengembalikan seluruh sistem ajaran dan cara berfikir kaum muslimin kepada dasar-dasarnya yang kokoh yaitu Alquran dan Alhadist serta dengan memperhatikan pada hal-hal seperti masalah sosial dan pendidikan.

Pertumbuhan dan perubahan umat Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang telah melahirkan adanya kecenderungan pengelompokan umat menjadi tiga kelompok umat. Pertama, umat Islam yang berpegang pada warisan tradisi abad pertengahan, yang beranggapan bahwa apa yang dicapai para ulama Islam terdahulu di bidang pemikiran agama, terutama pemikiran imam ke empat mahdzab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, dinilai sebagai hanya yang absolut, tidak ada hasil pikiran lain yang dapat menandingi. Oleh karena itu,

tertanam rasa skeptisme dalam tubuh kaum muslimin, dan ketidakmampuan dalam memecahkan masalah-masalah agama. Kedua, kelompok cendekiawan muslim yang umumnya berpendidikan Barat merasa sinis dengan kenyataan umat Islam yang terbelakang. Kelompok ini menilai bahwa setiap yang dihasilkan kebudayaan barat identik dengan kemajuan, sehingga mereka kehilangan pandangan terhadap ajaran Islam. Ketiga, kelompok cendekiawan muslim yang dengan seluruh kemampuan inteletiknya berusaha mencoba membandingkan ajaran dengan seluruh sistem filsafat hidup. Kelompok ini menilai, penyebab kemunduran kaum muslimin terletak di dalam kenyataan bahwa kaum muslimin telah jauh meninggalkan pedomannya yang asli yaitu Alquran dan Alhadist PP Persis, Hasil-hasil muktamar Persis XI, 2000,:3). Kelompok inilah yang berusaha untuk memperjuangkan gagasan kearah reformasi dan modernisasi masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan Alquran dan Alhadist.

Proses perubahan alam pikiran tentang Islam terjadi setelah terbukanya komunikasi dengan pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah, seperti Mesir dan Arab Saudi. Proses perubahan ini dila-kukan oleh individu dan kelompok masyarakat yang merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan identitas dan ajaran Islam di Indonesia. Usaha tersebut direalisasikan dengan mendirikan organisasi keagamaan di antaranya Persatuan Islam (Persis). Organisasi semacam ini mempunyai peranan penting dalam menyalurkan alam pikiran pembaharuan dan syiar Islam.

Persatuan Islam (Persis) merupakan salah satu organisasi Islam yang ingin mengadakan pembaharuan khususnya dalam ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah Rasul. Organisasi ini, walaupun pengikutnya tidak terlalu banyak akan tetapi telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persis dapat dikatakan sebagai organisasi yang mewakili sebagian besar umat Islam Indonesia yang ingin mengadakan pembaharuan terhadap ajaran Islam. Pembaharuan yang dimaksudkan kembalinya kepada ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang terdapat pada Alquran dan Alhadist.

Organisasi Persis yang didirikan di Bandung tahun 1923, telah berhasil berkembang di seluruh Indonesia dan salah satu cabang Persis berada di Kabupaten Serang. Berdasarkan paparan di atas maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan dan kiprah Persis dalam pembangunan umat Islam di Serang. Penelitian ini mengambil judul **PERGERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM, Studi Historis Tentang Eksistensi Persatuan Islam (PERSIS) Di Kabupaten Serang Banten**".

B. PERMASALAHAN

Persatuan Islam adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang ingin mengadakan pembaharuan masyarakat muslim di Indonesia. Demikian juga Persis Serang yang merupakan bagian dari Persis Pusat berusaha melakukan pembaharuan masalah akidah dalam masyarakat Islam Serang.

Dalam penelitian ini kami mencoba untuk mengungkapkan mengenai kiprah Persis dalam pembaharuan Islam di Kabupaten Serang dalam tinjauan historis. Oleh karena itu, ada sebuah pertanyaan pokok yang mendasari penelitian ini, yaitu “Bagaimanakah kiprah dan perjalanan Persis Serang dalam pembaharuan dan pembangunan umat Islam di Serang”.

Berdasarkan atas pertanyaan pokok di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi bahan kajian antara lain:

1. Kapan lahirnya organisasi Persatuan Islam.
2. Bagaimana organisasi Persatuan Islam dapat masuk ke Kabupaten Serang.
3. Bagaimana eksistensi Persis Serang pada dekade awal keberadaan di Serang.
4. Bagaimana peranan Persis Serang dalam pembaharuan Islam pada masyarakat Serang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah dan kiprah Persatuan Islam di Serang.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya organisasi Persatuan Islam (Persis)
2. Untuk mengetahui awal mula lahirnya Persis Serang masyarakat Serang
3. Untuk mengetahui keberadaan Persis pada dekade dan sambutan masyarakat terhadap Persis Serang.
4. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Persis Serang dalam pembaharuan akidah Islam.

D. RUANG LINGKUP

Penelitian ini difokuskan pada eksistensi Persatuan Islam dan dibatasi dalam dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup variabel atau materi.

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Serang Propinsi Banten. Pertimbangan dipilihnya wilayah Kabupaten Serang karena Persis Serang merupakan organisasi yang paling eksis di wilayah Banten dan dalam perjalanan sejarahnya banyak mengalami tantangan yang sangat berat.

Ruang lingkup materi adalah menyoroti perjalanan sejarah Persis Serang sebagai organisasi keagamaan dalam upaya pembaharuan dan pembangunan umat Islam di daerah Serang Banten. Pada penelitian inipun berusaha diungkapkan keadaan Serang sebelum dan sesudah Persis berkembang di daerah tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan metode sejarah pada umumnya, maka penelitian ini menempuh tingkat-tingkat kerja sebagai berikut:

1. Heuristik atau proses pencarian dan pengumpulan sumber. Pada tahap heuristik ini digunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:
 - a. Studi kepustakaan, dilakukan di berbagai perpustakaan baik di Bandung maupun Serang.
 - b. Penelitian lapangan lapangan, yaitu pencarian data atau informasi di wilayah penelitian.
 - c. wawancara dengan tokoh-tokoh yang berperan atau mengetahui mengenai Persatuan Islam di Serang.
2. Kritik sumber untuk memperoleh kebenaran dan kejernihan data, baik kritik ekstern (tentang wujud sumber) ataupun kritik intern (tentang isi sumber) maupun melakukan perbandingan data yang berasal dari macam-macam sumber.
3. Pada tahap interpretasi, yakni proses pemberian makna dan penafsiran secara jelas dan lengkap terhadap data yang diperoleh dilapangan.
4. Historiografi adalah proses terakhir dalam penulisan sejarah yang berupa proses merangkaikan fakta-fakta yang berhasil dihimpun, menjadi sebuah tulisan sejarah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mempermudah dalam membaca dan menelaah materi penelitian ini, maka laporan penelitian dibagi menjadi 4 (empat) bab. Antara bab satu dengan bab lainnya merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metoda penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Serang, pusat syiar Islam di daerah Banten. Pada bab ini akan dipaparkan tentang keadaan Banten secara umum, seperti awal mulanya persentuhan Serang dengan Islam, Serang sebagai pusat Islam dan atau pusat syiar Islam di Banten, dan organisasi Islam yang ada di Serang Banten.

Bab III Peranan Persatuan Islam (Persis) Serang dalam upaya pembaharuan umat Islam di Serang Propinsi Banten

Pada bab ini diuraikan tentang proses lahirnya Organisasi Islam yang bernama Persatuan Islam (Persis), keberadaan dan perkembangan Persis Serang, dan sejarah atau perkembangan Persis Serang dalam pembaharuan umat Islam di Serang Banten.

Bab IV Penutup

Pada bab laporan ini, akan dilengkapi oleh daftar pustaka, nama sumber, dan beberapa lampiran.

BAB II

S E R A N G

PUSAT ISLAM DI DAERAH BANTEN

Serang adalah sebuah kabupaten di wilayah Propinsi Banten dan sekaligus sebagai ibukota Propinsi Banten, Serang ini identik dengan Banten, pada masa dahulu daerah Serang lebih dikenal dengan nama Banten. Sebenarnya Banten adalah nama pelabuhan Kerajaan Sunda yang berubah menjadi pusat kekuasaan kerajaan pada masa Islam dengan nama Kesultanan Banten. Tinggalan Kesultanan Banten pada masa sekarang berada di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, apabila membicarakan Serang tempo dulu atau sejarah Serang sama artinya dengan membicarakan Banten.

Ibukota Kesultanan Banten yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat bagian Barat dengan Banten yang terkenal dan banyak disinggahi para saudagar dari berbagai negeri, terletak di dalam wilayah Kabupaten Serang sekarang. Pada saat ini, tinggalan Banten lama dan pelabuhan Karangantu menjadi aset andalan wisata sejarah dan budaya yang potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang.

Pada paparan di bawah ini akan mencoba mengangkat keadaan Serang pada awal persentuhan dengan Islam sampai berdirinya organisasi-organisasi keagamaan pada awal abad ke 20 Masehi.

A. AGAMA ISLAM MASUK KE SERANG BANTEN

Pada masa pra-Islam, daerah Serang atau Banten dikenal sebagai sebuah pelabuhan perniagaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu, Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran yang berpusat di “daya” Pakuan, Bogor sekarang. Kerajaan Pajajaran ini pernah menguasai seluruh daerah Jawa Barat

dengan kota-kota pelabuhan atau perniagaan yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa Barat, seperti Banten, Pontang, Cikande, Tangerang, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon (Edi S. Ekadjati, dkk., 1986:2-3). Hal ini dibenarkan oleh Tome Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1513 Kerajaan Sunda memiliki kota pelabuhan di pesisir utara Jawa Barat, seperti Banten, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon termasuk kota pelabuhan yang cukup baik dan besar (Armando Cortesao, 1964:170-175). Ketiga kota tersebut mengalami kemajuan dan berkembang pada jaman Islam sehingga dapat sejajar dengan kota pelabuhan internasional di Asia.

Adanya kegiatan perniagaan di pelabuhan-pelabuhan Sunda itulah yang menyebabkan terjadinya persentuhan dengan dunia luar termasuk dengan dunia Islam. Agama Islam yang lahir di Kota Mekkah, Arab Saudi dengan melalui perniagaan secara berangsur-angsur masuk ke daerah Indonesia, termasuk Jawa Barat, membentuk komunitas muslim, bahkan akhirnya menjadi kekuasaan-kekuasaan Islam dalam bentuk negara Islam.

Agama Islam masuk ke Jawa Barat dimulai di daerah pesisir utara. Cirebon dan Cimanuk adalah kota pelabuhan yang pertama-tama dimasuki oleh Agama Islam melalui para saudagar pedagang muslim (Armando Cortesao, 1964:183). Setelah para saudagar muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan tersebut, sebagian penduduk setempat berangsur-angsur memeluk Agama Islam. Pada akhirnya, salah satu kota pelabuhan yaitu Cirebon berkembang menjadi menjadi kekuasaan Islam yang berdiri sendiri, berkat kerja keras Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang ditunjang oleh Kesultanan Demak (Atja, 1970:53-54). Pada perkembangan selanjutnya tahun 1479, Cirebon berhasil melepaskan diri dari ikatannya dengan Kerajaan Sunda.

Cirebon sebagai pusat kekuasaan dan syiar Islam berusaha keras melakukan syiar Islam ke daerah sekeliling Cirebon, bahkan ke seluruh Jawa Barat. Perhatian Sunan Gunung Jati, selanjutnya adalah daerah bagian barat Kerajaan Sunda, seperti Banten dan Kalapa. Daerah-daerah tersebut, merupakan kota pelabuhan Kerajaan Pajajaran yang aktif berkembang dengan pedagang luar.

Kerajaan Pajajaran atau Sunda melihat perkembangan Agama Islam di bawah komando Cirebon dan Demak terus melebarkan pengaruhnya ke wilayah barat, merasa khawatir terhadap kedudukan Kerajaan Sunda. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh Islam terhadap wilayah kekuasaannya, Kerajaan Sunda menjalin kerjasama dengan bangsa Portugis yang telah berkuasa di Malaka sejak tahun 1511. Ajakan kerjasama Kerajaan Sunda tersebut, sudah barang tentu disambut gembira oleh Portugis, yang memang sudah berniat untuk mengembangkan pengaruhnya ke Kerajaan Sunda.

Hubungan antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1512. Pada saat itu, utusan penguasa Kerajaan Sunda yang bernama Ratu Samiam (Sanghiang) datang ke Malaka untuk meminta bantuan kepada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque. Ratu Samiam datang kembali ke Malaka tahun 1512 dengan maksud yang sama, tetapi pemimpin Portugis telah diganti oleh Jorge d'Albuquerque (J.C. Hageman, *Geschiedenis der Soenda-landen*, TBG XVI, 1867:210; Dalam Marwati Djoened P. Dkk., 1984:372-372). Sebagai kunjungan balasan dan dalam rangka persetujuan, Portugis mengirim utusan yang dipimpin Hendrik de Leme ke Kerajaan Sunda. Perjanjian persahabatan antara kedua belah pihak dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1522, dan ditandatangani oleh Ratu Surawisesa di pihak Kerajaan Sunda dan Hendrik de Leme dari pihak Portugis (Marwati Djoened P. Dkk., 1984:373-374). Perjanjian persahabatan ini diabadikan dalam bentuk tugu peringatan yang diletakkan di pinggir Sungai Ciliwung (Lasmiyati dkk, 1999/2000:12).

Adanya perjanjian persahabatan antara Kerajaan Sunda dan Portugis membuat Cirebon dan apalagi Demak menjadi gusar. Demak berusaha menempatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat, dengan maksud untuk memutuskan hubungan Kerajaan Sunda dengan Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Demak berusaha merebut daerah-daerah Kerajaan Sunda yang terdapat di pesisir utara, seperti Banten dan Kalapa. Usaha ini dilakukan dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah.

Pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah terlebih dahulu singgah di Cirebon. Sementara itu, Demak dan Cirebon mempunyai hubungan yang kuat dalam sebuah ikatan persahabatan yang dinamakan "Keluarga Besar Demak-Cirebon". Cirebon merasa mempunyai kepentingan yang sama dengan Demak, maka pasukan Cirebon ikut bergabung. Pasukan Demak-Cirebon ini dipimpin langsung oleh Fatahillah (berita Portugis menyebutnya Faletihan) dan Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati). Ekspedisi militer ini berhasil menguasai Banten pada tahun 1526. Saat ekspedisi militer ini datang di Banten telah ada kelompok masyarakat muslim yang ikut mendukung dan membantu pasukan Cirebon-Demak (Atja, 1970:53-54). Untuk sementara waktu, Banten diperintah oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian menikah dengan Putri Kawung Anten, putri penguasa Banten (lihat Bab Cirebon).

Sementara itu, pemerintahan Portugis di Malaka mengirim ekspedisi ke Sunda Kalapa untuk melaksanakan isi perjanjian dengan Kerajaan Sunda. Ekspedisi ini dipimpin oleh Francisco De Sa dengan membawa enam kapal besar menuju Sunda Kalapa. Untuk menghadang pasukan Portugis tersebut, penguasa Demak dan penguasa Cirebon Sunan Gunung Jati memerintahkan

untuk merebut Sunda Kalapa (Marwati Djoened, P. dkk., 1984:20; lihat pula R.A. Hoesen Djajadiningrat).

Pasukan Fatahillah berhasil merebut Sunda Kalapa pada tahun 1527 dan pada tahun yang sama berhasil menghalau dan mengusir pasukan Portugis yang datang ke Sunda Kalapa. Sejak terusirnya bangsa Portugis dari Sunda Kalapa diubah namanya menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna (Sutrisno Kuntoyo, 1986:40-41) dan Fatahillah ditetapkan sebagai Adipati Jayakarta dengan tetap berada di bawah kekuasaan Banten.

Dengan penguasaan Sunda Kalapa tahun 1527, maka seluruh pesisir utara Jawa Barat telah berhasil menjadi wilayah oleh kekuasaan Islam. Cirebon dan Banten berkembang menjadi pusat penyebaran Islam sehingga penyebaran Islam ke pedalaman Jawa Barat atau daerah Kerajaan Sunda dilakukan melalui dua front, yaitu front barat (Banten) dan front timur (Cirebon). Dengan dikuasainya kedua wilayah tersebut, Kerajaan Sunda semakin terjepit bahkan akhirnya hancur oleh serangan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf pada tahun 1579 (Soekmono, 3, 1987:57-58).

Pemerintahan Banten sejak awal penguasaan Islam diperintah oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan Cirebon diperintah oleh putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Pada tahun 1552, Pangeran Pasarean meninggal dunia, sehingga Sunan Gunung Jati kembali memerintah di Cirebon dan meninggal di Cirebon. Sebelum meninggalkan Banten, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaan Banten kepada putranya yaitu Pangeran Sabakingkin atau dikenal dengan nama Sultan Hasanudin.

Sultan Hasanudin merupakan penguasa Banten pertama, karena berhasil melepaskan diri dari pengaruh Demak dan Cirebon. Oleh karena itu, sejak tahun 1568 Kesultanan Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dengan penguasa pertamanya Sultan Hasanudin.

B. SERANG (BANTEN LAMA) SEBAGAI PUSAT KEKUASAAN ISLAM DI BANTEN

Banten (sekarang Kabupaten Serang) pada awal perkembangannya merupakan pelabuhan yang penting dilihat dari sudut geografis dan ekonomis, karena letaknya yang strategis Selat Sunda menjadi mata rantai perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatra. Pentingnya Banten lebih dirasakan terutama waktu Selat Malaka berada di bawah pengawasan politik Portugis di Malaka.

Pada awalnya, daerah Banten merupakan pelabuhan dagang Kerajaan Sunda yang berhasil direbut oleh kekuasaan Islam dari pasukan Cirebon-Demak. Sebenarnya, menurut sumber tradisi (Babad Cirebon dan Carita Purwaka Caruban Nagari) pada saat Syarif Hidayatullah pertama kali ke Banten, di daerah ini telah terbentuk komunitas muslim hasil binaan Sunan Ampel. Kelompok muslim ini ikut membantu pasukan Cirebon-Demak dalam menguasai Banten.

Setelah Banten menjadi kerajaan bercorak Islam, maka ibukota dipindahkan ke dekat pesisir, yaitu ke Surosowan (kini sering disebut Banten Lama) pada tanggal 1 Muharam 1526 M atau 8 Oktober 1526 M. Pada awalnya pusat kekuasaan Banten (hindu) berada di Banten Girang (Wakanten Girang). Pendirian awal kota Surosowan (Banten Lama) oleh Maulana Hasanudin atas petunjuk ayahnya Sunan Gunung Jati, pembangunan kiota ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf.

Sultan Hasanudin atau Maulana Hasanudin adalah Sultan Banten pertama. Pada masa Sultan Hasanudin berkuasa lebih menekankan pada bidang keagamaan, sebab ayahnya memang mem- persiapkan beliau untuk menyebarkan Agama Islam. Cara yang dilakukan Sultan Hasanudin dalam menyebarkan Agama Islam adalah, ia lebih menekankan pada kebiasaan masyarakat sehari-hari (Halwany Michrob, 1993:68). Maksud Hasanudin menggunakan cara demikian, agar ajaran Islam mudah dicerna dan dimengerti oleh masyarakat Banten. Selain itu, Sultan Hasanudin pun melakukan perluasan daerah dan perdagangan.

Dalam membangun negerinya selain memperhatikan bidang keagamaan, Maulana Hasanuddin menitikberatkan pada pengembangan pada sektor perdagangan, perluasan daerah pertanian, dan perkebunan. Banten dikembangkan menjadi pelabuhan transit atau persinggahan saudagar asing seperti dari India, China, Parsi, dan Gujarat. Adapun komoditas perdagangan rempah-rempah yang sangat laku saat itu adalah lada, dan sangat laku di pasaran Asia dan Eropa. Para pedagang asing tersebut membawa barang dagangan dari daerah asalnya, misalnya pedagang Cina seperti sutra, porselen, dan benang sulam. Sistem perdagangan yang berlangsung saat itu masih menggunakan sistem barter.

Sementara itu, para saudagar dan pedagang muslim yang aktif berdagang di Pelabuhan Banten juga sekaligus aktif menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, Banten berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat.

Maulana Hasanuddin yang memerintah Banten sejak 1552, wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di samping Masjid Agung Banten. Sepeninggal Maulana Hasanudin, posisi penguasa Banten dipegang oleh putranya yang

bernama Maulana Yusuf. Usaha Maulana Hasanuddin yang menitikberatkan pada bidang perdagangan, diteruskan oleh Maulana Yusuf. Dia membangun sebuah kubu pertahanan (*gawe kuta bulawarti bata kalawan kawis*) dan menekankan pembangunan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, dan pertanian (Hoesein Djajadiningrat, 1983: 38). Namun demikian Maulana Yusuf, tidak memberikan perhatian yang maksimal pada bidang keamanan, sebab musuh utama adalah Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Kerajaan Pajajaran yang telah menjalin perdagangan dengan Portugis, telah terdesak ke pedalaman dan tinggal menunggu waktu masa kehancurannya.

Pada masa Maulana Yusuf keadaan perniagaan semakin ramai dengan banyaknya pedagang asing yang datang dari berbagai negara dan dari berbagai daerah di Nusantara. Sebagian dari para pedagang itu kemudian ada yang menetap, baik untuk sementara maupun jangka lama. Oleh karena itu, Maulana Yusuf berupaya untuk membuat pemukiman di luar tembok istana sesuai dengan asal daerah mereka atau disesuaikan dengan keahliannya. Pemukiman tersebut berbentuk perkampungan antara lain bernama Pekojan, yaitu sebuah kampung yang diperuntukkan bagi pedagang muslim, baik yang berasal dari Arab, China, maupun Persia; Kampung Pecinan, kampung yang diperuntukkan bagi orang-orang China; Panjunan, kampung yang ditempati oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidang gerabah, periuk, dan belanga; Kampung Kepanden, sebuah kampung yang ditempati oleh tukang besi. Tujuan Maulana Yusuf menerapkan sistem perkampungan demikian adalah untuk kerapihan dan keamanan, dalam arti untuk berjaga-jaga menghindari terjadinya perampokan.

Selain upaya pembenahan pemukiman, Maulana Yusuf juga menganjurkan kepada rakyat Banten agar membuka daerah-daerah baru untuk pesawahan. Pesawahan tersebut tidak hanya berada di kota kerajaan, tetapi di luar kota kerajaan atau di daerah sekeliling kota kerajaan. Pembangunan pesawahan ini didukung dengan pembangunan sarana pengairan, seperti terusan-terusan yang menghubungkan antara bendungan dengan pesawahan. Selain itu, untuk menampung kebutuhan air juga dibangun semacam waduk buatan yang bernama "Tasikardi", meskipun untuk mengairi pesawahan sendiri diambil dari Sungai Cibanten. Pembangunan Danau "Tasikardi" memiliki tujuan khusus, selain untuk mengairi sawah, juga membuat penampungan air untuk kebutuhan penduduk kota dan keluarga keraton. Di tengah-tengah danau Tasikardi dibangun sebuah pulau kecil, yang berfungsi untuk tempat rekreasi.

Maulana Yusuf menikah dengan Ratu Hadidjah, dan dikarunia dua orang putra, yaitu Pangeran Muhammad dan Ratu Winaon. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580 dan dimakamkan di Pakalangan Gede, dekat Kampung

Kasunyatan. Pengganti Maulana Yusuf adalah putranya yang bernama Pangeran Muhammad yang baru berusia 9 tahun.

Oleh karena Pangeran Muhammad masih berusia belia, maka segala urusan pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi. Pada masa Pangeran Muhammad inilah Keraton Banten diberi tembok, yang terbuat dari bata merah dengan tinggi lebih dari hasta orang dewasa. Tembok-tembok tersebut tidak dilengkapi menara, yang ada hanya semacam tiang gantungan tinggi 3 “stagie”, yang terbuat dari kayu besar.

Sultan Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang soleh dan taat menjalankan Agama Islam, serta mempunyai perhatian yang besar terhadap kehidupan keagamaan. Sultan banyak menulis kitab-kitab yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk sarana ibadah, Sultan Maulana Muhammad membangun masjid sampai ke pelosok-pelosok yang terdapat masyarakat muslimnya.

Untuk memperluas daerah kekuasaan Banten, Sultan Maulana Muhammad pada tahun 1596 mengadakan serangan ke Palembang. Penyerangan dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur sungai. Jalur darat melalui daerah Lampung, sedangkan jalur sungai dilakukan dengan cara menyusuri Sungai Musi. Pertempuran antara pasukan Banten dengan Palembang berlangsung berhari-hari. Pada awal pertempuran tersebut pasukan Palembang dipukul mundur oleh Banten. Pada saat pasukan Banten berhasil mendesak pasukan Palembang terjadi musibah pada pasukan Banten, Sultan Banten Maulana Muhammad tertembak dan meninggal dunia. Oleh karena itu, penyerangan ke Palembang dihentikan. Pangeran Maulana Muhammad meninggal dunia dalam usia 25 tahun dan mendapat gelar Pangeran Seda ing Palembang. Ia dimakamkan di samping Masjid Agung Banten.

Pada saat yang bersamaan dengan serangan Banten ke Palembang tahun 1596, di pelabuhan Banten datang orang-orang Belanda untuk pertama kalinya. Perkenalan ini ternyata menimbulkan kericuhan karena sikap orang Belanda yang angkuh, akibatnya orang Belanda diusir oleh penduduk Banten.

Sementara itu, gugurnya Sultan Maulana Muhammad telah memicu perselisihan di lingkungan keluarga istana. Putra mahkota yang bernama Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir, baru berusia 5 bulan. Oleh karena itu, Untuk menjalankan roda pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Jayanagara bersama sesepuh kerajaan dan para pembesar kerajaan lainnya. Mangkubumi sebagai wali Sultan selalu berpijak pada kebijaksanaan dengan mempunyai sifat

lemah lembut dan tidak berlaku sewenang-wenang. Setiap keputusan yang diambil selalu dimusyawarahkan dengan para pembesar kerajaan.

Banten pada masa pemerintahan Sultan Mafakhir Mahmud Abdul Kadir ini juga ditandai dengan datangnya Belanda dalam rangka usaha perdagangan. Pada saat itu, Banten mengalami masa kemajuan, tetapi dalam posisi puncak pemerintahan terjadi kekurangserasian. Oleh karena Sultan masih muda sehingga roda pemerintahan dikendalikan oleh Mangkubumi. Padahal sebenarnya, Mangkubumi sendiri selalu sibuk dalam urusan dagang dengan bangsa Eropa. Oleh karena itu, ancaman berupa perebutan kekuasaan di lingkungan istana dapat menguat kepermukaan.

Pada Tahun 1602, Mangkubumi Jayanegara meninggal dunia. Oleh karena adanya berita bahwa keturunan sultan terdahulu ingin memegang kekuasaan, maka kekuasaan Mangkubumi Jayanegara diserahkan kepada ibunda Sultan, yaitu Nyai Gede Wanagiri.

Pada saat sedang menjadi Mangkubumi, Nyai Gede Wanagiri menikah lagi dengan bangsawan Keraton Banten, sehingga suaminya menduduki jabatan Mangkubumi. Mangkubumi yang baru ini, ternyata memiliki mental dan jiwa lemah, sehingga mudah menerima suap. Roda pemerintahan di bawah Mangkubumi mengakibatkan rakyat Banten menderita, banyak pembesar kerajaan yang merasa tidak puas, dan pertentangan antar pembesar keraton semakin tajam.

Para pembesar yang tidak senang terhadap Mangkubumi memandang tingkah laku Mangkubumi terlalu berlebihan dan sangat mencolok. Pertentangan telah mengakibatkan terbunuhnya Mangkubumi, peristiwa pembunuhan ini dilakukan oleh Yudanegara.

Adanya pembunuhan terhadap Mangkubumi membuat Sultan Muda sangat sedih. Oleh karena itu, para pangeran mengadakan pertemuan untuk membahas pembunuhan Mangkubumi. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Pangeran Rana Manggala, Pangeran Upapatih, dan Pangeran Mandalika, Sedangkan Pangeran Kulon, Pangeran Singaraja, Ratu Bagus Kidul, dan Tubagus Perbangsa tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Pangeran Yudanegara menghadap Pangeran Kulon dan mengatakan bahwa Pangeran Kulon lah yang berhak memimpin Kerajaan Banten. Keinginan ini didukung oleh bangsawan Banten, seperti Ronggo Loleta, Adipati Keling, dan Pangeran Wiramanggala.

Dengan demikian, di dalam lingkungan istana Banten ini terdapat dua kelompok yang bertentangan. Pertentangan ini menyebabkan terjadinya perselisihan para pangeran, akibatnya Panji Jayengtilem tewas di tangan Pangeran Upapatih dan Pangeran Singajaya tewas di tangan Ki Subuh (pembantu Pangeran

Upapatih). Untuk memancing agar Pangeran Kulon keluar, pihak keraton menghanyutkan mayat Jayengtilem ke dalam sungai yang diikat dengan batang pisang.

Pangeran Kulon yang mengetahui kejadian itu menjadi marah, sehingga tanpa perhitungan ia langsung membalas dengan melakukan penyerbuan ke dalam istana. Serangan dapat dipatahkan apalagi setelah Pangeran Ranamanggala datang beserta pasukannya. Pada saat kritis tersebut, datang Pangeran Jayakarta dengan pasukannya menghentikan perang saudara. Pangeran Jayakarta berusaha mendamaikan kedua kelompok yang bertikai. Pangeran Kulon Pangeran Singajaya, dan Tubagus Prabangsa yang dianggap sebagai pemberontak tidak dibunuh, melainkan diasingkan di Jayakarta selama 4 tahun.

Setelah perang saudara di Keraton Banten berakhir, maka kedudukan Mangkubumi dipegang Pangeran Ranamanggala. Mangkubumi Ranamanggala banyak melakukan perombakan pemerintahan dan penertiban keamanan negara. Kerja berat Pangeran Ranamanggala berhasil menyelamatkan Banten dari kehancuran dan perpecahan baik dari orang-orang di dalam keraton sendiri maupun campur tangan bangsa Belanda. Pangeran Ranamanggala, sebagai wali Sultan memiliki jiwa yang arif dan adil dalam bertindak.

Sementara itu, penguasa Jayakarta yang nota bene bawahan Banten melakukan perjanjian dagang antara Pangeran Jayakarta dan Belanda, sehingga mengakibatkan hubungan antara Pangeran Jayakarta dengan Banten menjadi renggang. Mangkubumi Banten yaitu Ranamanggala mengutus Embah Rangkun ke Jayakarta untuk memberi masukan agar Jayakarta berhati-hati terhadap Belanda. Niat baik Banten tersebut dicurigai oleh Pangeran Jayakarta. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Jan Pieter Zoon Coon (pimpinan dagang VOC di Jayakarta) dengan memindahkan bandar dagang yang selama ini dilaksanakan di pelabuhan Banten ke Pelabuhan Jayakarta. Hal ini tentu dapat mengakibatkan perdagangan di Banten menurun.

Adanya campur tangan Belanda dalam perpindahan bandar dagang mengakibatkan permusuhan antara Banten dan VOC. Permusuhan antara Banten dan VOC berlanjut, terutama dalam masalah perdagangan, seperti peristiwa yang menimpa kapal China yang akan membeli lada ke Banten. Lada yang dibeli oleh pedagang dan China dari Banten diminta oleh VOC untuk dikembalikan. Apabila melawan maka kapal China akan ditenggelamkan. Mangkubumi Banten melakukan protes terhadap VOC, tetapi tidak membawa hasil. Akibatnya Pelabuhan Banten semakin hari semakin sepi, perdagangan telah berpindah ke Jayakarta.

Pada bulan Januari 1624, Mangkubumi Pangeran Arya Ranamanggala meletakkan jabatan mangkubumi karena sakit. Pemerintahan Banten diserahkan kepada Sultan Abdullah Kadir yang memang sudah dewasa. Ranamanggala telah mengundurkan diri, walaupun begitu beliau masih tetap dimintai pendapatnya oleh sultan.

Awal pemerintahan Sultan Abdul Mafakhir diwarnai dengan bentrokan dan perbedaan kepentingan, terutama dalam monopoli dagang antara kompeni Belanda dengan Banten. Antara Banten dan VOC Belanda terjadi perang yang dimenangkan oleh Banten. Selain itu, terjadi pula bentrokan senjata antara Cirebon dan Banten. Cirebon sedang terjepit antara dua kerajaan besar, yaitu Mataram dan Banten. Cirebon yang masih bersaudara dengan Banten, justru memihak Mataram agar Banten tunduk kepada Mataram. Banten menolak permintaan Mataram melalui pihak Cirebon, karena Banten merasa memiliki kekuatan cukup kuat. Atas bujukan Mataram, Cirebon melakukan penyerangan ke Banten. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan *“Peristiwa Pagarage”* (Peristiwa Pacerebonan).

Pada tanggal 10 Maret 1661, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia dan digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Adipati Anom Pangeran Surya. Sultan ini adalah putra dari Sultan Ma’ali Achmad (putra Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir dengan Ratu Martakusumah), dengan gelar Sultan Abdul Fath Abdul Fattah.

Sultan Fath sangat membenci Belanda sebagai penjajah. Untuk mengusir Belanda, Sultan Abdul Fath sering melakukan penyerangan secara gerilya, terutama di daerah Angke Tangerang. Tempat ini oleh sultan dijadikan front terdepan sebelum melakukan penyerangan ke Jayakarta. Belanda sangat kerepotan menghadapi pasukan Sultan Abdul Fath yang melakukan gerilya secara terus-menerus. Untuk membalas serangan sultan, Belanda melakukan siasat halus berupa pemberian beberapa hadiah. Akan tapi, Sultan menolak mentah-mentah pemberian tersebut, bahkan Sultan semakin gencar melakukan perusakan kebun tebu milik Belanda, penggilingan padi, dan pencegahan patroli Belanda.

Sultan Abdul Fath ternyata bukan hanya ahli dalam strategi perang, juga sangat memperhatikan perkembangan pendidikan agama Islam. Misalnya, di kompleks Masjid Agung didirikan madrasah dengan mendatangkan guru-guru agama dari luar, seperti dari Aceh dan Makasar. Sultan ingin agar tercipta generasi serta pemimpin rakyat yang shaleh dan taat beragama.

Sultan Abdul Fath mengangkat putra pertamanya yang bernama Sultan Haji sebagai mangkubumi kedua dalam struktur pemerintahan, dan sebagai putra

mahkota. Putra mahkota ini bertugas menjalankan segala urusan di lingkungan dalam istana. Urusan yang menyangkut di luar istana tetap dilaksanakan oleh sultan.

Untuk memperkuat bidang pertahanan, khususnya di daerah Angke dan Tangerang, maka Sultan Abdul fath mengambil tempat di daerah Tirtayasa, tidak jauh dari Keraton Surosowan. Pemilihan daerah Tirtayasa ini karena mudah dijagkau, dan mudah untuk mengontrol Keraton Surosowan.

Sultan Haji yang mengurus urusan di dalam keraton mempunyai jiwa yang lemah dan mudah dipengaruhi orang lain. Belanda memanfaatkan Sultan Haji dengan mengadu domba antara Sultan Haji dengan ayahnya Sultan Abdul Fath.

Sikap lunak Sultan Haji kepada kompeni Belanda tidak membuat Sultan Abdul Fath berubah pikiran, ia tetap membenci Belanda. Pada waktu Sultan Abdul Fath mengetahui bahwa Belanda menahan beberapa kapal Banten dan sekaligus menuduh mereka sebagai perampok, maka Sultan segera menyusun kekuatan dan mengultimatum Belanda agar membebaskan kapal-kapal Banten. Oleh karena Belanda tidak mengabulkan urulan Sultan, maka Sultan segera mengumpulkan pasukan yang berasal dari Tanahara, Pontang, Tirtayasa, Caringin, dan sekitarnya, Sultan pun menyatakan perang terhadap Belanda.

Tindakan Sultan Abdul Fath di atas dinilai Sultan Haji sebagai tindakan yang gegabah, ceroboh, dan tanpa musyawarah. Adanya pernyataan Sultan Haji tidak disukai Sultan Abdul Fath, sehingga Sultan Abdul Fath menyerbu Keraton Surosowan. Keraton Surosowan dapat direbut, namun Sultan Abdul Fath terkejut karena Sultan Haji memberi perlindungan kepada Kompeni Belanda.

Dengan perlindungan Sultan Haji, Belanda membalas mengirim utusan yang dipimpin yaitu Kapten Francois Tack dan Kapten Hartsincla untuk menyerang Keraton Surosowan. Serangan Belanda berhasil melumpuhkan pasukan sultan, sehingga Sultan Abdul Fath beserta sisa pasukannya bergerak mundur ke arah Kademangan dan Tanahara. Tanahara pun dapat dikuasai pasukan Belanda, yang dipimpin Kapten Jouker. Akhirnya daerah Tirtayasa yang selama ini dipertahankan keras oleh sultan, jatuh pula ke tangan Belanda.

Setelah beberapa wilayah Banten berhasil dikuasai Belanda, Sultan Abdul Fath memerintahkan sisa pasukannya untuk mundur ke arah selatan, yaitu ke Hutan Keranggan. Sultan pun memerintahkan untuk membakar bekas kediamannya, dengan alasan agar tidak dapat ditempati Belanda. Adanya peristiwa pembakaran rumah Sultan Abdul fath di Tirtayasa, sehingga dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa.

Sultan Ageng yang hanya memiliki pasukan yang sedikit tetap mempunyai semangat untuk melawan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa sering melakukan berbagai penyerangan terhadap Belanda. Belanda yang merasa terganggu dengan adanya serangan Sultan Ageng, berusaha untuk menangkap Sultan Ageng. Usaha ini dilakukan Belanda dengan cara membujuk Sultan Haji agar ayahnya mau pulang ke Keraton Surosowan. Sultan Haji menuruti kemauan Belanda, dengan membuat surat kepada Sultan Ageng yang meminta agar ayahnya pulang ke Keraton Surosowan karena ayahnya sudah tua.

Surat tersebut dibawa oleh utusan Sultan Haji ke tempat persembunyian Sultan Ageng di daerah Sajira. Sultan Ageng tanpa curiga menerima tawaran anaknya. Sultan Ageng dengan didampingi para pengikutnya pulang ke Keraton Surosowan. Setelah Sultan Ageng kembali dan menetap di Keraton Surosowan, maka Belanda segera menangkapnya. Sultan Ageng dibawa ke Batavia dengan penjagaan yang ketat, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia sebagai tawanan Belanda.

Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa ternyata diteruskan oleh sisa-sisa pasukan Sultan Ageng dan rakyat yang mencintai Sultan Ageng. Salah satunya adalah ulama Banten yang berasal dari Makasar yaitu Syeh Yusuf. Syeh Yusuf pun akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda.

Setelah Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh Belanda, politik Banten mengalami masa-masa suram. Keadaan ini disebabkan oleh Belanda yang sepenuhnya mempengaruhi dan mengawasi Banten. Sultan Haji yang dikukuhkan menjadi Sultan Banten oleh Belanda, ternyata membuat Kerajaan Banten makin terpuruk sebagai daerah jajahan Belanda. Sultan Haji sebagai Sultan hanya boneka dan alat Belanda dalam memeras rakyat Banten.

Oleh karena itu, setelah Sultan Haji berkuasa di Surosowan, ternyata pemberontakan dan kekacauan di Banten terus bermunculan. Rakyat Banten yang menderita menghendaki adanya Ratu Adil, yang dapat mengatasi keadaan negeri. Semakin banyak rakyat yang sudah tidak mempercayai Sultan, mengakibatkan Sultan Haji jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sultan Haji dimakamkan di Sedakingkin yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Banten.

Sepeninggal Sultan Haji, di Keraton Surosowan terjadi perebutan kekuasaan di antara para putra Sultan Haji. Perebutan kekuasaan berakhir dengan diangkatnya putera Sultan Haji yaitu Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Abu'l Fadh Muhammad Yahya (1687-1690).

Sultan Abu'l Fadh Muhammad Yahya termasuk orang yang membenci Belanda. Ia mulai menata kembali Keraton Surosowan Banten yang porak poranda akibat serangan Belanda. Sultan ini memimpin Kerajaan Banten tidak lama karena meninggal dunia. Oleh karena sultan tidak mempunyai keturunan, maka kerajaan dipegang oleh adiknya yang bernama Sultan Abu'l Mahasin Muhammad Zainal Abidin (1690-1733).

Pada saat pemerintahan Banten dipegang oleh Abu'l Mahasin, keadaan negeri tidak banyak perubahan. Setelah ia meninggal, tampuk pimpinan diserahkan kepada putra keduanya yang bernama Sultan Abulfathi Muhammad Shifa, putra pertamanya meninggal dunia dibunuh oleh Belanda.

Pada saat pemerintahan Sultan Abulfathi Muhammad Shifa, kerajaan Banten kembali dilanda kekacauan. Rakyat kembali mengadakan pemberontakan terhadap Belanda dengan menolak kerja rodi. Sementara itu, situasi keraton banyak dipengaruhi oleh permaisuri raja yang bernama Ratu Syarifah Fatimah. Kekisruhan di keraton timbul karena tidak menyetujui pengangkatan Pangeran Gusti sebagai putra mahkota. Ratu Fatimah menginginkan Pangeran Syarif Abdullah sebagai putra mahkota. Oleh karena itu, Ratu Fatimah dengan tipu muslihat mengirim Pangeran Gusti ke Batavia dan di tengah perjalanan Pangeran Gusti ditangkap oleh Belanda.

Penangkapan Pangeran Gusti, membuat Ratu Fatimah mempunyai alasan mendesak Sultan agar mengangkat Pangeran Syarif Abdullah menjadi putra mahkota. Pengangkatan Pangeran Syarif Abdullah tidak disetujui oleh sebagian besar keluarga istana dan rakyat Banten. Rakyat Banten tetap menghendaki Pangeran Gusti yang menjadi Sultan. Protes rakyat ini kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata terhadap istana dan Belanda. Perlawanan rakyat Banten ini dipimpin Kyai Tapa.

Untuk memadamkan perlawanan Kyai Tapa, Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari Batavia. Sebelum pasukan bantuan datang, pasukan Kyai Tapa segera melakukan serangan ke Keraton Banten. Oleh karena itu, untuk meredakan perlawanan rakyat banten ini maka Belanda menangkap Ratu Fatimah dan Sultan Syarifudin serta mengembalikan Pangeran Gusti ke tahta kerajaan Banten.

Tindakan Belanda kemudian ialah menangkap Ratu Fatimah dan Sultan Syarif Abdullah, kemudian mengangkat adik Sultan yang bernama Arya Adisantika dengan gelar Sultan Abulma'ali Muhammad Wasi' Zainul 'Alamin pada tahun 1752. Untuk sementara waktu, perlawanan rakyat Banten dapat diredakan, apalagi setelah

Pangeran Gusti diangkat sebagai putra mahkota. Namun keadaan damai di Banten tidak berlangsung lama, rakyat yang mengetahui proses perjanjian dengan kompeni telah membuat para pembesar keraton dan rakyat gusar. Akhirnya, rakyat Banten kembali menghubungi Kyai Tapa untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi, Kiai Tapa tidak dapat berbuat banyak, karena pasukan Belanda lebih kuat.

Sultan Abulma'ali berkuasa hanya selama enam bulan, dan jabatan Sultan diserahkan kepada Pangeran Gusti. Pangeran Gusti dinobatkan menjadi Sultan Banten dengan gelar Abu'l Nas'r Muhammad 'Arif Zainul 'Asiqin. Setelah Pangeran Gusti meninggal, digantikan oleh Sultan Abu'l Mafakhir Muhammad Aliuddin (1773-1793).

Berdasarkan catatan sejarah ternyata keadaan Kerajaan Banten pasca pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tidak ada yang berhasil mengangkat Banten sebagai kerajaan yang maju. Keraton Banten terus dilanda kekisruhan dengan seringnya terjadi perebutan kekuasaan. Pada tahun 1803 kesultanan Banten dipegang oleh Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin dengan gelar Sultan Abu'l Nas'r Muhammad Ishak Zainul Muttaqin atau Sultan Aliuddin II (1803-1808). Pada masa itu, Belanda mewajibkan rakyat Banten yang berumur lebih dari 16 tahun dan berbadan sehat untuk menanam pohon lada yang hasilnya harus dijual kepada Belanda. Kewajiban ini jelas-jelas merugikan dan memeras petani Banten.

Sementara itu, di Batavia terjadi pergantian Gubernur Jenderal Belanda ke tangan Gubernur Jenderal H. Willem Daendels. Daendels sebagai wakil pemerintah Republik Bataasche Belanda di Pulau Jawa berencana membuat benteng pertahanan di Pulau Jawa untuk mempertahankan diri dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Daendels ingin membuat jalan yang menghubungkan ujung barat dengan ujung timur Pulau Jawa sehingga gerakan pasukan akan lebih cepat. Selain itu untuk memperkuat pertahanan daerah Jawa dari serangan Inggris, Daendels membuat benteng di pelabuhan di Banten.

Untuk keperluan itu, VOC meminta bantuan kepada Sultan Banten, untuk mengerahkan rakyat Banten. Akibatnya, banyak pekerja yang meninggal dunia, sakit keras, dan melarikan diri. Melihat berkurangnya para pekerja, Daendels sangat marah dan menuduh Mangkubuni Wargadiraja sebagai biang keladinya. Daendels mengajukan permintaan kepada Sultan Banten, antara lain :

1. Sultan harus mengirimkan 1.000 orang rakyat setiap hari untuk dipekerjakan di Ujung Kulon.

2. Sultan harus menyerahkan Patih Mangkubumi Wargadiraja ke Batavia.
3. Agar Sultan memindahkan keratonnya ke daerah Anyer, karena Surosowan akan dijadikan benteng Belanda (Halwany, Michrob, dkk., 1990 : 174).

Permintaan H.W. Daendels ditolak oleh Sultan Aliuddin yang tidak menyukai Belanda. Daendels mengutus Judl De Puy untuk mendesak Sultan agar memenuhi permintaannya. Utusan Belanda tersebut dibunuh oleh rakyat Banten, yang ingin mempertahankan tanah Banten. Daendels sangat murka dan segera mengirim pasukan untuk menyerang Istana Surosowan. Serangan pasukan Belanda sangat mengejutkan Banten, karena tidak memiliki persiapan untuk bertahan sehingga Keraton Surosowan dapat direbut dengan mudah oleh Belanda. Sultan Aliuddin ditangkap Belanda dan di buang ke Ambon, sedangkan Mangkubumi Wargadireja yang dituduh sebagai dalang kerusuhan dihukum pancung dan dibuang ke laut. Untuk menjalankan pemerintahan Kerajaan Banten, Daendels mengangkat seorang sebagai wakil sultan, yaitu Pangeran Suramanggala.

Tindakan Daendels ini menimbulkan rasa benci masyarakat Banten. Para ulama bergabung dengan masyarakat tidak tinggal diam untuk meneruskan perjuangan. Mereka melakukan serangan gerilya dengan melakukan perampokan-perampokan dan pengacauan terhadap kedudukan pasukan Belanda. Selain itu, pasukan rakyat membuat pasukan khusus yang bermarkas di daerah Cibungur, Pantai Teluk Marica. Pasukan Belanda yang mengetahui gerakan rakyat segera menyerang markasnya. Serangan pasukan Belanda tidak berhasil, bahkan pasukan tersebut dapat dipukul mundur.

Daendel berangapan bahwa kekalahan pasukan belanda akibat pasukan rakyat dipimpin langsung oleh Pangeran Suramanggala. Oleh karena itu, pasukan Belanda melakukan pembalasan dengan menyerbu dan membakar Keraton Surosowan. Keraton Surosowan yang telah sekian lama menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten dan daerah Banten langsung di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda.

Dalam pemerintahan Kesultanan Banten, sejak Sultan Maulana Hasanuddin Agama Islam memegang peranan penting. Tokoh-tokoh agama diikuti sertakan dalam sistem administrasi negara yang memegang posisi penting dalam pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Mereka dapat dengan mudah memasuki istana maupun rumah pejabat di daerah. Sebagian dari tokoh agama itu ada yang menjadi penasihat Sultan, dan bahkan Sultan sendiri menjadi ulama dan pemimpin Agama Islam tertinggi dalam negara. Tokoh Agama islam yang masuk dalam lingkungan keraton diantaranya Syekh Yusuf.

Kedudukan dan peranan tokoh-tokoh Agama Islam itu mengalami perubahan yang menuju kemunduran setelah masuknya kekuasaan Kompeni Belanda ke dalam keraton Banten. Banyak tokoh agama yang ke luar dan menjauhi keraton dengan mengasingkan diri ke luar kota bahkan ke daerah pedalaman. Keadaan ini makin parah setelah dibentuknya pemerintahan kolonial Belanda yang mengakibatkan lenyapnya kekuasaan Sultan Banten.

C. BERDIRINYA ORGANISASI ISLAM DI SERANG

Memasuki abad ke 20, terjadi perubahan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yaitu dengan dijalankannya politik balas budi atau lebih dikenal dengan nama Politik Etis. Kebijakan “berkedok memperhatikan dan memajukan kesejahteraan rakyat pribumi” melalui jalur pendidikan, dengan jalan membuka lebih banyak sekolah-sekolah rendah. Namun kebijakan politik pemerintah Belanda tersebut, sesungguhnya diarahkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Oleh karena, pendidikan bagi bangsa Indonesia itu hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah (Kosoh S., dkk. 1994:158-160).

Namun demikian, dengan adanya Politik Etis telah mengubah pandangan para pemimpin pergerakan perjuangan rakyat, yang tadinya bersifat lokal kedaerahan mulai mengadakan koordinasi dalam kesamaan cita-cita untuk memerdekakan diri secara nasional. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 20 mei 1908 berdirilah Budi utomo yaitu perkumpulan pelajar sekolah dokter pribumi STOVIA di Jakarta oleh Wahidin Sudirohusodo, Satiman Wiryosanjoyo dan lain-lain.

Pergerakan kebangsaan kaum terpelajar di Indonesia semakin marak. Beberapa perserikatan yang semula bergerak dalam lapangan sosial, agama, dan pendidikan juga bergerak dalam bidang politik. Perserikatan yang semula bergerak dalam bidang agama yang juga bergerak dalam bidang politik antara lain Sarekat Dagang Islam (1905) di Solo, Sarekat Islam (1911) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al Irsyad (1914) di Jakarta, Mathla’ul SANwar (1916) di Menes Banten (Dr. H. Djauhari, 2000:113)

Bagi masyarakat Banten yang dikenal dengan “kefanatikannya” kepada ajaran Islam, bertempereamen keras, dan radikal dalam menghadapi penjajah menyambut baik keberadaan organisasi itu. Sarekat Islam (SI) merupakan salah satu perserikatan yang mendapat tempat pada masyarakat Banten, karena hampir semua ulama Banten bergabung dalam perserikatan ini.

Disamping Sarekat Islam, Partai komunis Indonesia (PKI) ternyata ikut pula memanfaatkan kebencian rakyat Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda. Melalui cara infiltrasi keanggotaan ganda, kader-kader PKI mengajak para ulama Banten untuk bergabung pula dengan PKI. Kelihaihan kader PKI melakukan permainan politiknya, membuat banyak tokoh-tokoh agama Banten masuk menjadi anggota PKI. Tidak sedikit tokoh-tokoh Banten disamping sebagai pengurus Sarekat Islam, juga menjadi pengurus PKI. Keanggotaan ganda tersebut dilakukan antara oleh K.H. Asnawi dan K.H. Ahmad Chotib, disamping sebagai ketua SI Cabang Caringin juga menjadi ketua PKI Cabang Caringin (Halwany Michrob, dkk., 1993:210-211). Akibat keanggotaan ganda tersebut berakibat fatal, karena ketika terjadi pemberontakan komunis pada tahun 1927 banyak ulama dari Banten (kebanyakan anggota Sarekat Islam) ditangkap dan dibuang ke Digul.

Usaha-usaha menggalang persatuan dalam melakukan aksi melawan pemerintah kolonial Belanda terus dilakukan. Pada tahun 1927, para pemimpin pergerakan mendirikan organisasi yang dinamakan Partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Organisasi-organisasi partai politik yang bergabung ke dalam PPPKI antara lain PNI, Algemene Studiclub, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Sumatra dan lain-lain. Organisasi-organisasi lain yang kemudian bergabung dengan PPPKI ialah Serikat Madura, Perserikatan Celebes, dan Perserikatan Tirtayasa Banten (Kosoh S. dkk., 1994:194)

BAB III

PERANAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) SERANG DALAM PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN ISLAM DI SERANG

Pembaharuan Islam sebenarnya adalah sebuah upaya re-form atau pembaharuan dalam agama akibat kehidupan masyarakat muslim yang banyak menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, istilah “Pembaharuan Islam” digunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui dan memperbaiki cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Gerakan ini, menurut Ibnu Taimiyyah (1263-1328) disebut muhyi salaf, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran sahabat Rosul dan Tabiin yang anti kemusrikan dan bidah dengan berpedoman pada Alquran dan As sunah.

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia telah muncul sejak abad ke-19 di Sumatera Barat. Gerakan ini dipelopori oleh ulama-ulama Minang, seperti Haji Mishin yang belajar di Arab (Muchlas) dan bersentuhan dengan gerakan Wahabi yang berusaha meluruskan dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Alquran dan As Sunnah. semangat Wahabi ini dibawa oleh ulama Minang ke daerah asalnya di Sumatera Barat.

Pada kuartal pertama abad ke-20 M upaya pembaharuan dalam kehidupan agama (Islam) muncul kembali di Indonesia. Pembaharuan ini berupa gerakan pelurusan agama Islam dengan menghilangkan unsur-unsur takhayul, khufarat, dan bidah, serta penafsiran baru ajaran Islam sehubungan dengan kehidupan politik, soaial, dan ekonomi (Edi Ekadjati, 1981/1982: 72). Gerakan pembaharuan Islam ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan organisasi-organisasi yang berlandaskan dan bertujuan memperbaiki kehidupan beragama di kalangan umat Islam. Organisasi-organisasi keagamaan itu di antaranya adalah Persatuan Islam (Persis).

A. AWAL MULA BERDIRINYA PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Ide pembentukan organisasi Persatuan Islam (persis) teretus dalam sebuah acara syukuran di rumah Haji Zamzam di Jalan Astaanyar Bandung (Yusuf Abdullah.Puar, 1978:1-5). Selepas makan bersama, para sahabat tuan rumah terlihat dalam diskusi agama dan pergerakan agama pada umumnya. Diskusi tersebut membahas masalah yang aktual pada saat itu, seperti masalah agama yang dibahas dalam majalah Al-Munir dan Al-Mawar, perselisihan antara Al-Irsyad dan Jamiat Khair di Jakarta, ceramah Pakih Hasim di Bandung, dan Komunisme.

Atas kesepakatan bersama Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus dan peserta diskusi lainnya, maka dirasakan perlu untuk mendirikan organisasi keagamaan yang dapat memperbaiki umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pada hari Rabu tanggal 1 Syafar 1342 H yang bertepatan dengan tanggal 12 September 1923 di Bandung dengan resmi didirikan organisasi Persatuan Islam (Persis). Organisasi ini pada permulaan berdiri diketuai oleh Akhmad Hasan dengan penasehat yang merangkap guru adalah Mohamad Natsir

Penamaan organisasi Persatuan Islam dimaksudkan untuk mengarahkan “ruh ijtihad” dan “jihad” dalam pencapaian harapan organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Selain itu, penamaan persatuan ini diilhami oleh firman Allah Swt dalam surat Al-Imron ayat 103 yang berbunyi “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali (undang-undang atau aturan) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai”, dan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Tarmidzi yang berbunyi “Kekuatan Allah itu bersama jamaah”. Kedua hal tersebut dijadikan motto Persis dan tertera di dalam lambang Persis berupa lingkaran bintang bersudut dua belas (PP Persis, 1957: 4-5).

Persatuan Islam sejak awal mempunyai motivasi untuk mengembalikan ajaran Islam kepada alquran dan Hadist dengan membersihkan Islam dari bidah dan khurafat. Motivasi ini kemudian dirumuskan dalam tujuan dan cita-cita Persis yang tertera pada rencana jihad dalam Qanun Asasi (anggaran Dasar) Persis Bab II Pasal 1 yang berisi sebagai berikut:

1. Mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Alquran dan As-Sunnah;
2. Menghidupkan ruhu/jihad dalam kalangan umat Islam;
3. Membasmi bid'ah, kurafat, takhayul dan syirik dalam kalangan umat Islam;
4. Memperluas tersiarnya tablig dan Dakwah Islamiyah kepada segenap lapisan masyarakat;

5. Mengadakan, memelihara, dan memakmurkan mesjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya untuk memimpin peribatan umat Islam menurut sunnah Nabi yang sebenarnya menuju kehidupan tagwa;
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putera puteri Islam dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah;
7. Menerbitkan kitab, buku, majalah, dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan kaum muslimin dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;
8. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami

Selain memuat tentang rencana jihad secara umum, Qanun Asasi pun memuat rencana jihad khusus yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Membentuk *harawiyun llsam* yang terdiri dari *muballigin* dan *muballighat* dengan jalan mempertajam serta memperdalam pengertian mereka dalam soal-soal dan ajaran Islam.
2. Mendidik dan membentuk warga dan anggota Persis supaya menjadi *uswatun hasanah* bagi masyarakat sekelilingnya, dan dalam lapangan *aqidah* dan *ibadah* maupun dalam *muamalah*.
3. Mengadakan tantangan dan perlawanan terhadap aliran yang mengancam hidup keagamaan pada umumnya dan hidup keislaman pada khususnya, seperti paham materialisme, atheisme, dan komunisme;
4. Melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar* dalam segala ruang dan waktu, dan melawan golongan musuh-musuh Islam dengan cara yang sepadan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (PP Persis, 1957:6-7)

Pada awal berdirinya, Persis melakukan kegiatan utama yang dipusatkan kepada penyebaran cita-cita dan pahamnya melalui pengajian, khotbah, kelompok belajar, membuat sekolah dan penerbitan pamflet, majalah dan buku. Penerbitan dimaksudkan untuk menyebarkan cita-cita Persis terutama kepada guru-guru dan aktifis organisasi lain seperti Al-Irsyad dan Muhamadiyah. Kegiatan Persis ini mendapat dukungan dana dari para pendiri dan jamaa'ah.

Perkembangan organisasi Persis tidak begitu pesat, tetapi pengaruhnya cukup luas. Pada tahun 1923, hanya terdapat sekitar 12 orang yang ikut shalat berjamaah yang diselenggarakan oleh Persis di Bandung. Jamaah Pesis

meningkat pada saat menjelang kedatangan Jepang, Masjid Persis di Kota Bandung sudah berjumlah 6 buah dengan jamaah sekitar 500 orang, dan yang terdaftar sebagai anggota Persis sebanyak 300 orang (Edi S. Ekadjati, 1984:75). Selanjutnya, Persis berkembang ke berbagai kota dengan membuka cabang di Bogor, Jakarta, Garut, Banjaran, Surabaya, Malang, Bangil, Padang, Sibolga, Banda Aceh, Banjarmasin, dan Gorontalo.

Selain melalui da'wah, dalam membina umat maka Persis pun mencurahkan perhatiannya pada pendidikan. Kegiatan pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren dan madrasah. Pendidikan ini juga dilaksanakan pada sore hari untuk anak laki-laki dan perempuan dari keluarga jamaah Persis, yang kemudian anak-anak dari luar Jamaah pun diterima. Bagi orang-orang dewasa diadakan kursus agama Islam yang dibimbing oleh Akhmad Hasan dan Haji Zamzam.

Pada masa penjajahan Belanda, Persis sudah memiliki Sekolah Guru dengan nama Kweekshool Pendidikan Islam (Pendis) (I. Djumhur dan Danasaputra., 1976:182). Pendidikan Persis ini telah dilaksanakan pada tahun 1924 oleh haji Zamzam dan Akmad Hasan.

Atas inisiatif Mohammad Natsir, Persis mendirikan pendidikan Islam yang kegiatannya menyelenggarakan sejumlah sekolah sejak taman kanak-kanak sampai sekolah menengah, yaitu Sekolah Dasar (HIS) didirikan tahun 1930, Sekolah Menengah (MULO) didirikan pada tahun 1931, dan Sekolah Guru pada tahun 1930. Pendidikan Sekolah Dasar (HIS) sampai tahun 1938 telah ada di lima tempat di Jawa Barat (Edi S. Ekadjati, 1984:76-77). Pada tahun 1936, Akhmad Hasan mendirikan pesantren Persis untuk melatih mubalig dan guru agama.

Perkembangan Persis dan juga organisasi sejenis yang ada di Indonesia mengalami hambatan pada masa penjajahan Belanda, terutama karena adanya ordonantie sekolah liar dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama. Keadaan ini sebagai akibat tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Selanjutnya, perkembangan organisasi di Indonesia, termasuk Persis mengalami kemacetan pada masa pendudukan Jepang dengan adanya larangan berkumpul dan berserikat.

Pada awal pendudukannya, Jepang berhasil memikat bangsa Indonesia (yang mayoritas muslim) dengan janji-janji kemerdekaan dan kebebasan bagi Indonesia. Jepang dengan propaganda religiusnya ternyata telah menipu umat Islam Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur raya.

Kekejaman Jepang di Indonesia bahkan melebihi kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Jepang dengan berbagai cara berusaha untuk men-Jepangkan-kan Indonesia, antara lain penggunaan bahasa Jepang, penggunaan ulama Islam untuk propaganda Jepang, dan juga menghapuskan ide Pan-Islamisme diganti dengan Pan-Asia yang dipimpin Jepang.

Untuk meraih simpati umat Islam, pemerintah Jepang yang diwakili oleh Kolonel Horie yang didampingi Haji Shimizu (Kepala Sendenbu) menyelenggarakan tabligh akbar untuk mengkampanyekan persatuan dan semangat membantu Jepang.

Hasil dari berbagai kunjungan itu maka dibentuklah Komite Pimpinan Persatuan Umat Islam (BPUI) yang diresmikan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1942. BPUI ini kemudian melahirkan Persatuan Alim Ulama (PAU) pada tanggal 24 Juli 1942.

Di dalam PAU, ternyata Muhammadiyah, Persis, maupun NU belum ikut. Oleh karena itu, pihak Jepang terpaksa mengizinkan kembali berdirinya MIAI pada tanggal 24 September 1942 dengan berusaha mendekati Muhammadiyah, Persis, dan NU. Selanjutnya, Pemerintah Jepang membentuk Majelis Syura Muslimin Indonesia dan membubarkan kembali MIAI pada tanggal 24 Oktober 1943. Masyumi digerakkan orang-orang yang aktif di bidang sosial bukan oleh orang-orang politik.

Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan umat Islam, Jepang membentuk seksi keagamaan (Shukuma) dengan ulama terkemuka di daerah sebagai pengurusnya. Adapun tugas yang harus dikerjakan Shumuka adalah :

1. Untuk meningkatkan bimbingan dan propaganda terhadap ummat Islam.
2. Untuk mempererat hubungan antara Pangrehpraja dan alim ulama.
3. Untuk mengaktifkan alim ulama supaya bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang
4. Untuk mengerahkan dan mengendalikan penghulu.
5. Untuk menyeleksi siswa yang dilatih sebagai alim ulama.

Oleh karena organisasi-organisasi pergerakan dilarang bergerak oleh pemerintah pendudukan Jepang, maka Persis pun tidak melakukan kegiatan formalnya. Sementara kegiatan non formal tetap dilaksanakan meski dengan pengawasan ketat tentara Jepang. Akhirnya, para pimpinan Persis memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri di dalam menghadapi dan menentang kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang (Sar'an, 1972).

Pada masa itu, organisasi Persis (1923-1945) dipimpin oleh A. Hasan, Mohammad Natsir, Isa Anshary, Rusyad Nurdin, dan Eman Sar'an. Para pemimpin Persis lebih banyak melakukan perjuangan secara individu, sehingga tidak dapat memainkan peranan yang menonjol dalam masalah perjuangan nasional. Akan tetapi, banyak pemimpin dan anggota Persis yang menduduki jabatan-jabatan penting di kantor-kantor agama yang didirikan oleh Jepang.

Sebagai pejabat pada pemerintah Jepang, para anggota Persis banyak dilibatkan pada organisasi Islam yang dianggap dapat bekerjasama dengan Jepang dan melibatkan diri dalam aktivitas sebagai anggota pelatihan dan indoktrinasi yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu pemimpin Persis yang aktif dalam kegiatan tersebut adalah Muhammad Isa Anshary yang menjabat sebagai sekretaris pada organisasi MIAI dan juga memegang jabatan yang sama di organisasi Masyumi.

Para pemimpin Persis itu menyadari bahwa pihak Jepang bukan hendak membangun Islam tetapi justru hendak menghancurkan Islam dengan cara men"sinto"kan Islam. Kecurigaan telah timbul pada para ulama Persis sejak adanya pelarangan pengajaran bahasa Arab dan aksara Arab, serta pelarangan pembukaan kembali sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Selain itu, para ulama Persis juga merasa tersinggung dengan adanya perintah untuk melaksanakan seikeirei, yang prakteknya sama saja dengan ruku dalam salat tapi mengarah ke arah mata hari terbit yang terletak di sebelah Timur.

Pelaksanaan seikerei sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang, Teno Heika ini dianggap oleh umat Islam anggota Persis sebagai upaya mengkufurkan Allah. Para ulama Persis berusaha menghambat proses Nipponisasi dengan strategi dakwah dan menanamkan kesadaran terhadap umat Islam Indonesia bahwa bagaimanapun Jepang lebih kafir dari pada Belanda. Muhammad Natsir, salah seorang penasehat pendidikan untuk daerah Priangan mengambil bagian aktif mengorganisir program-program pelatihan di daerah Jawa. Berbagai diskusi yang dilakukan para ulama Islam tersebut sudah tentu kontradiksi dan cenderung banyak ajaran propaganda Jepang.

Upaya resistensi para ulama Persis terhadap kebijakan Jepang tentu saja mengandung resiko yang besar. Polisi rahasia Jepang "Kempetai" menangkap dan menyiksa para ulama Persis, seperti Akhmad Hasan, Mohammad Isa Anshary, dan Eman Sar'an yang menentang berseikeirei (Sar'an, 1972; Shiddiqi, 1984: 126). Penentangan umat Islam terhadap seikeirei dianggap Profesor Ozaki (juru bicara pemerintah pendudukan Jepang) sebagai kesalahan umat Islam dengan

tuduhan hendak melawan pemerintah Dai Nippon. Menanggapi tuduhan tersebut, maka Kiai Haji Mas Mansur dengan tegas menyatakan bahwa:

Orang-orang Islam Indonesia terutama mereka yang mempunyai pengertian yang jelas terhadap semua persoalan berpendapat bahwa kita bisa bekerja sama dengan tentara Dai Nippon, akan tetapi dengan syarat dipakai suatu jalan yang tidak menghina agama. Namun karena sekiranya agama dihinakan, maka haruslah diketahui bahwa orang-orang Islam yakin untuk membela agamanya, walaupun apa yang terjadi (Benda, 1980: 157).

Selain menentang untuk melaksanakan seikeire, para ulama memanfaatkan penataran yang diselenggarakan oleh pihak Jepang untuk kepentingan pergerakan kebangsaan Indonesia. Adapun manfaat penataran itu adalah: (1) para ulama mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sesama ulama dari daerah lain yang saat itu transportasi sangat sulit, sehingga fasilitas yang ada digunakan oleh mereka untuk saling berkunjung selama dalam perjalanan, (2) selama 30 hari di dalam asrama memungkinkan para ulama untuk berinteraksi dan membicarakan masalah secara bersama, (3) upaya indoktrinasi pihak Jepang justru mengakibatkan para ulama semakin kokoh terhadap kebenaran agamanya dengan meningkatkan soliditas antar ulama, (4) semakin mengkrystalnya penolakan terhadap doktrin Jepang, dan (5) para ulama mendapat kesempatan latihan militer (lihat Noer, 1987: 27-28).

Perlawanan secara frontal terhadap Jepang memang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh para ulama. Oleh sebab itu, para ulama berusaha secara kreatif untuk memanfaatkan apa yang dibentuk oleh Jepang. Hal itu tampak dengan apa yang dilakukan oleh Mohammad Natsir dari Persis yang memegang Kepala Kantor Pendidikan pada Pemerintahan Jepang di Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung. Mohammad Natsir melaksanakan kewenangannya itu dengan melakukan latihan para ulama di daerah Priangan yang lebih menekankan pada soal keyakinan dan iman.

Begitu juga dengan berdirinya Hizbullah pada tanggal 4 Desember 1943. Organisasi ini memobilisasi para pemuda muslim untuk berlatih militer. Pada akhirnya Hizbullah menjadi tempat investasi bagi pemuda muslim, sehingga para santri yang biasanya hanya belajar agama, atau sesekali ke sawah atau ke ladang membantu para Kiai, kini memperoleh kesempatan berlatih militer.

Pada waktu dilaksanakan mobilisasi muslim dalam barisan lasykar Hizbullah dan Peta, banyak ulama Persis dan anggota Pemuda Persis yang bergabung di dalamnya. Jepang memang mengizinkan dibentuknya Hizbullah dan Peta

digerakkan dengan motif jihad. Jepang mengira kedua badan itu akan bermanfaat bagi kepentingan Jepang, ternyata mereka keliru sebab bangsa Indonesia tetap memandang Jepang sebagai kaum kafir. Kedua organisasi itu dimanfaatkan oleh pihak Indonesia dengan sebaik-baiknya. Latihan-latihan kemiliteran dijadikan modal dasar dalam upaya konsolidasi perjuangan bersenjata dan menjadi sarana untuk melatih kepercayaan pada diri sendiri, ketabahan, perjuangan tanpa mengenal menyerah, serta memupuk semangat kebersamaan dan kebangsaan.

Peran Persis dalam masa pendudukan Jepang terlihat dari peran Akhmad Hassan sebagai Ketua Pembelaan Islam terhadap aliran-aliran yang akan menghancurkan Islam di Indonesia. Hal ini merupakan bukti adanya kepercayaan dan dukungan dari tokoh-tokoh ulama Islam Indonesia terhadap potensi Persis dalam mengemban misi jihadnya. Begitu juga dengan Mohammad Natsir, dengan persetujuan Persis dan restu Ahkmad Hasan, atas permintaan Gubernur Jenderal militer Jepang di Jawa Barat serta Walikota Bandung diangkat sebagai kepala pendidikan pada pemerintah Jepang di Jawa Barat berkedudukan di Bandung. Pada kesempatan itu Mohammmad Natsir telah membentuk Majelis Islam yang statusnya semi pemerintah dan berhasil menghimpun para mubaligh Persis untuk melaksanakan dakwah sampai ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan fasilitas Jepang.

Selain itu, di bidang pendidikan sejak adanya larangan pemerintah Jepang terhadap sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Arab, maka banyak sekolah yang tutup. Untuk mengisi kekosongan di bidang pendidikan Persis membuka pesantren tingkat Ibtidaiyah di bawah asuhan Ustadz Rusjad Nurdin dan Ustadz E. Abdurrahman. Pesantren ini ternyata mengalami kemajuan pesat dan membutuhkan guru tambahan. Dengan bantuan Ustadz Qomaruddin, Ustadz Sudibja dan Ustadz Abdullah, pesantren ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membentengi murid-muridnya dari upaya pemusrikan yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Padahal menurut aturan internasioal, Indonesia sebagai daerah yang kalah menjadi milik pemenang perang (Sekutu). Menurut Perjanjian Postdam Indonesia harus diserahkan kembali kepada Belanda. Oleh sebab itu, Sekutu dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambilalih kekuasaan dari Jepang. Bangsa Indonesia yang telah memerdekakan diri tentu saja tidak mau dijajah kembali, maka terjadilah peperangan yang dalam sejarah Indonesia disebut periode Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik (1945-1950).

Pada masa perang kemerdekaan umat Islam ikut membela negara dan agama sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban bela negara ini dinyatakan oleh tokoh Persis Mohammad Natsir berikut:

"Tahukah saudara-saudara, tatkala kita berenang dalam lautan revolusi nasional kita pada tahun 1945. Siapakah yang memanggil dan untuk apa panggilan itu? Sehingga umat Islam menutup mata dan telinga, dan hanya hati saja yang terbuka. Pada waktu itu orang menamakan panggilan itu aneka warna. Ada yang mengatakan panggilan itu pertiwi, dsb. Bagi umat Islam panggilan itu sudah 13 abad, yaitu "wa jahidu fi sabilillah", dengan taat dan duduk menyerahkan diri terhadap Allah SWT".
Itulah jiwa umat Islam Indonesia.

Pada saat negara Indonesia berada dalam bahaya, maka umat Islam dengan keyakinan tauhidnya tidak segan-segan berjuang dengan berkorban apa saja, baik harta, tenaga, bahkan jiwanya sendiri. Umat Islam di seluruh penjuru tanah air, bangkit memanggul senjata melawan penjajah kafir. Para pimpinan Persis beserta para anggotanya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah menggabungkan diri ke dalam organisasi perjuangan, terutama ke dalam lasykar Hisbullah dan Sabilillah.

Selain ikut bertempur di medan perang, Persis juga merasa perlu untuk membangun ideologi. Keinginan itu mendapatkan moment yang tepat ketika pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Anjuran Pemerintah tentang pendirian partai-partai politik. Oleh karena itu, umat Islam menyelenggarakan muktamar yang dihadiri oleh seluruh organisasi Islam yang ada dan berhasil memutuskan untuk mendirikan Majelis Syura Pusat (Masyumi) yang dianggap satu-satunya partai politik umat Islam.

Tokoh-tokoh Persis berperan aktif dalam muktamar itu dan berhasil menempatkan orang-orangnya di Masyumi, seperti Mohammad Natsir dan Anshari yang terpilih sebagai pimpinan Masyumi di tingkat pusat (Mughni, 1980: 85). Selanjutnya tokoh-tokoh Persis mensosialisasikan perlunya partai politik dengan menegaskan bahwa semua orang Islam wajib aktif dalam kegiatan politik sebagai salah satu kewajiban agama. Upaya itu dilakukan dalam berbagai tulisan, pidato, fatwa-fatwa ulama Persis, dan manifesto organisasi. Manifes Perjuangan Persis menyebutkan:

Persatuan Islam semenjak berdirinya bersemboyan hendak mengembalikan umat Islam kepada Alquran dan As-sunnah, maka isi semboyan dan inti dakwah itu bukan saja terbatas dalam lapangan aqidah dan ibadah, tetapi

lebih luas daripada itu, ialah berjuang menegakkan keyakinan, dengan Al-Quran dan Sunnah berjuang dalam politik memenangkan ideologi Islam (Anshary, 1958: 24).

Ideologi yang dibangun Persis tampak dalam tulisan-tulisan Mohammad Natsir yang intinya mewajibkan umat Islam ikut dalam kegiatan politik. Alasannya Islam adalah filsafat hidup untuk menuntun perilaku muslim dan tidak bisa dipisahkan dalam setiap tingkah laku manusia, termasuk politik. Umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari politik, dan sebagai aktivis politik, umat islam tidak bisa memisahkan diri dari ideologi politiknya yaitu Islam. Bagi kaum muslimin menegakkan agama Islam tidak bisa dipisahkan dari menegakkan masyarakat, bangsa, dan kemerdekaan (Natsir, 1958: 157). Pendapat itu sejalan dengan tulisan Isa Anshary dalam Falsafah Perjuangan Islam (1949) yang mengatakan bahwa umat Islam berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan semata-mata untuk “membangun negara dalam keridlaan Allah, memenuhi tanggung jawab mereka sebagai umat Islam”.

Pada pasca revolusi fisik, kepemimpinan Persis memasuki periode kepemimpinan yang kedua yang dipegang oleh Mohammad Isa Anshary, Fakhruddin Al-Khahiri, Ustadz O. Qomaruddin Saleh, dan Ustadz E. Abdurrahman. Pada saat ini, Persis menghadapi persoalan politik yang tidak stabil dengan adanya demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik tumbuh dengan subur. Selepas demokrasi liberal, Persis harus menghadapi Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Presiden Sukarno dengan tujuan membentuk negara dan masyarakat yang didukung oleh ideologi nasionalis, agama, dan komunis.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, peran politik kelompok Islam semakin terpinggirkan, apalagi setelah dibubarkannya Masyumi pada tahun 1960. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia berkembang dan mempunyai pengaruh yang luas. Meskipun demikian, menurut Feith (1963: 238) pengaruh Masyumi masih tetap besar di kalangan umat Islam. Oleh karenanya, pada bulan Januari 1962 banyak mantan pemimpin Masyumi dan PSI ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan PRRI, antara lain Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranagara, Burhanuddin Harahap, Assaat, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, Isa Anshary, E.Z. Muttaqien, Junnan Nasution, Kasman Singodimedjo, dan Hamka.

Periode tahun 1960-1965 merupakan tahun-tahun yang penuh dengan fitnah dan teror bagi pemimpin Islam. Feith (1963: 28) mengatakan orang-orang Masyumi telah dibuat tidak berdaya secara politik, tetapi tetap aktif menentang

keadaan politik saat itu. Mereka memiliki dasar ideologi yang kuat sehingga ketidakberdayaan mereka hanya bersifat sementara.

Situasi semakin parah ketika PKI bermain mata dengan Sukarno dan melenggang di pentas politik nasional bergan-dengan tangan dengan kelompok nasionalis. Kekuatan politik Islam yang menjadi musuh utama komunis semakin tidak berdaya. PKI berusaha keras merobohkan Islam yang menjadi penghalang bagi PKI dalam menanamkan ajaran komunisnya kepada masyarakat. PKI dengan tidak segan-segan mengemukakan dalil-dalil bahwa komunisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu, para penganut agama Islam harus membantu usaha PKI dalam mencapai cita-citanya. Akibatnya, tidak sedikit umat Islam yang terpengaruh dan membantu PKI.

Dalam menyikapi keadaan politik nasional yang cenderung didominasi oleh PKI, Persis mempunyai pendirian untuk menentangnya secara total tanpa kompromi. Persis berusaha untuk membendung arus komunisme dengan berbagai cara, antara lain menerbitkan buku, mengeluarkan manifesto dan fatwa yang menjelaskan dasar-dasar penolakan terhadap komunisme (Mughni, 1980: 112). Persis menerbitkan majalah anti komunisme yang di dalamnya memuat seruan-seruan agar umat Islam melawan ideologi-ideologi yang tidak selaras dengan Islam.

Pada tanggal 4 Maret 1957 Pimpinan Pusat Persis mengeluarkan manifesto politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Isa Anshary dan Sekretaris Umum K.H.E. Abdurrahman. Manifesto itu menegaskan bahwa teori dan praktek komunis bukan saja bertentangan dengan semua agama, tetapi mengandung permusuhan dan pertentangan dengan semua agama, juga memusuhi akidah yang diajarkan oleh semua agama. Secara tegas Isa Anshary mengatakan bahwa komunis jelas-jelas menolak Tuhan, wahyu, dan nabi-nabi serta memandang agama sebagai takhayul. Kesungguhan Persis dalam menentang komunisme terlihat dari Manifesto Persis yang dikeluarkan tahun 1953-1960.

Selain itu, Persis juga mengeluarkan berbagai fatwa, di antaranya fatwa yang mengatakan bahwa setiap muslim yang mengikuti konsep politik PKI dianggap murtad, sehingga bila meninggal tidak perlu dishalatkan dan dimakamkan secara Islam. Fatwa lainnya ialah perkawinan antara seorang muslimah dengan seorang anggota komunis dianggap tidak syah. Persis pun membentuk front anti komunis untuk membasmi komunisme di seluruh lapisan masyarakat.

Pemuda Persis juga berusaha membendung pengaruh komunis di masyarakat dengan cara mengadakan tabligh ke berbagai daerah yang dikuasai

oleh PKI. PKI berusaha membujuk pemuda Persis agar mau bekerjasama dengan mereka, tetapi pemuda Persis menolak dengan tegas. Penolakan pemuda Persis itu diungkapkan oleh Ustadz Syarif sebagai berikut:

"Kami dari pemuda Persis sudah berkeyakinan bahwa haram hukumnya bekerja sama dengan komunis, jika Pemuda Rakyat keluar dari BKSPM, kami akan masuk. Atau jika Pemuda Rakyat bercokol di BKSPM, Pemuda Persis berdiri di luar".

Pada suatu rapat pleno Pusat Pimpinan Persis tahun 1960 K.H. Isa Anshary mencetuskan gagasan agar Persis diubah dari organisasi massa menjadi organisasi politik dengan nama baru, Jama'ah Muslimin. Gagasan ini ditolak oleh K.H.E. Abdurrahman dengan dukungan Pimpinan Pusat Pemuda Persis. Adanya perbedaan pandangan ini menimbulkan sedikit ketegangan di tubuh Persis karena kedua kelompok (kelompok K.H. Isa Anshary dengan kelompok Ustadz Abdurrahman) tidak tercapai kata sepakat.

Dalam Mukhtar Persis di Bangil. Pimpinan Pemuda Persis yang seharusnya mengikuti Mukhtar tidak diikutsertakan. Pimpinan Pemuda Persis segera mengirim surat edaran kepada peserta mukhtar mengenai alasan ketidakhadiran Pimpinan Pemuda Persis dalam Mukhtar serta menjelaskan konflik intern dalam tubuh Persis.

Perbedaan berlanjut ketika dalam mukhtar itu K.H. Isa Anshary menyampaikan makalah dengan judul **"Ke Depan Dengan Wajah Baru"** yang berisi perlunya Persis mengubah wajah dan aktifitasnya dari organisasi pendidikan dan dakwah menjadi organisasi sosial politik dengan nama baru, Jamaah Muslimin. Prasaran Isa Anshary ditolak oleh 95% peserta mukhtar dan para peserta mukhtar sudah siap akan memilih, K.H.E. Abdurrahman sebagai Ketua Umum Pusat Pimpinan Persis.

Untuk mengatasi kekisruhan, maka Ketua Majelis Ulama Persis, Abdul Kadir Hasan dengan menggunakan hak veto menyatakan (1) segala keputusan Mukhtar Persis Ketujuh dibatal-kan, dan (2) Menunjuk K.H. Isa Anshary, Fakhruddin Al-Khahiri, dan Rusyad Nurdin sebagai formatur penyusun tasykil Pusat Pimpinan Persis. Keputusan Majelis Ulama Persis mengundang reaksi dari para peserta mukhtar, sehingga 75% peserta mukhtar meninggalkan sidang.

Sebulan setelah mukhtar, tasykil Pusat Pimpinan Persis yang baru diumumkan dengan Fakhruddin Al-Khahiri sebagai Ketua Umum. Pengumuman itu mendapat reaksi keras dari banyak cabang yang menganggap Ketua Umum yang baru tidak syah karena bukan pilihan umat. Reaksi keras itu berlanjut dengan

pernyataan dari cabang-cabang yang memutuskan untuk putus hubungan dengan Pusat Pimpinan Persis dan bergabung dengan Pimpinan Pusat Pemuda Persis.

Akibat reaksi itu, beberapa bulan kemudian Fakhruddin Al-khahiri menyerahkan mandat kepada Majelis Ulama Persis. Dengan demikian, Pimpinan Pusat Persis berada di tangan Majelis Ulama Persis, tetapi cabang-cabang Persis tetap menyatakan diri bermaklum kepada Pimpinan Pusat Pemuda Persis sebelum ada kejelasan secara tuntas masalah yang dihadapi sejak muktamar.

Untuk mengatasi masalah itu, Pimpinan Pusat Pemuda Persis mengirim utusan untuk menemui Ketua Majelis Ulama Persis di Bangil. Pada pertemuan itu diputuskan bahwa Pimpinan Pusat Pemuda Persis dan beberapa cabang Persis di Bandung ditunjuk sebagai panitia pemilihan Pusat Pimpinan Persis secara referendum.

Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan pada tahun 1962 dengan hasil memilih K.H.E. Abdurrahman sebagai Ketua Umum Pusat Pimpinan Persis yang diterima secara bulat oleh cabang-cabang Persis.

Pada awal kepemimpinan Ustadz Abdurrahman terjadi perubahan besar dalam kehidupan politik nasional dengan tumbangannya kekuasaan Sukarno dan hancurnya PKI. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang buruk terhadap organisasi Persis maka Ustadz Abdurrahman melakukan pengawasan ketat sebagai suatu isolasi strategis untuk kembali ke khittah. Keputusan itu diambil sebab sering terjadi pemalsuan nama jamiyyah Persis untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Persis. Persis dijadikan alat berlandung sekaligus penyelamat bagi mereka yang ingin bersih dari keterlibatannya dalam peristiwa PKI. Persis dianggap organisasi yang paling menentang komunis sehingga mereka akan aman dari pembersihan yang dilakukan tentara.

Adanya kebijakan isolasi strategis itu berdampak pada putusnya hubungan antara Pusat Pimpinan Persis dengan cabang-cabang Persis yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jaringan pembinaan dari Pusat Pimpinan terputus oleh Peristiwa G30S/PKI sehingga jumlah anggota merosot tajam. Secara kasat mata seolah-olah merupakan sebuah kemunduran kuantitas, namun pada hakikatnya justru untuk menemukan mutiara-mutiara berkualitas dari lumpur politik.

Setelah berhasil membenahi diri ke dalam maka langkah berikutnya adalah mengembangkan jamiyyah. Identitas yang paling menonjol dari Persis adalah perjuangannya di bidang tabligh dan dakwah, baik lisan maupun tulisan. Tabligh dan dakwah merupakan sarana pengembangan faham Alquran dan As-Sunnah dan sarana untuk membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, syirik, dan musyrik. Persis

meyakini bahwa Islam adalah agama dakwah sehingga organisasi Islam haruslah merupakan organisasi dakwah, pendidikan, dan tabligh. Hal ini tertuang dalam Qanun Asasi Persis Bab I pasal 5 ayat 3 yang mengatakan bahwa “Jamiyyah ini bergerak dalam bidang pendidikan, tabligh, dan sosial kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah”.

Dengan demikian, dapat dipahami apabila para anggota Persis bertindak tidak hanya sebagai anggota semata-mata, melainkan juga bertindak sebagai mubaligh. Asumsinya adalah menjadi seorang muslim, artinya menjadi juru dawah, mubaligh, dan penyampai risalah Rasulullah Saw kapan dan di mana saja dalam segala bidang, ruang, dan waktu. Rasulullah pernah memerintahkan pada seluruh umatnya “sampaikan dariku walau satu ayat”. Perintah ini menjadi landasan perjuangan Persis. Persis menyerukan seluruh anggota untuk menjadi juru dawah dan mubaligh dengan tidak lupa pada landasan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pelaksanaan dakwah Persis lebih berorientasi ke dalam, yaitu kepada umat Islam sendiri dan menyelesaikan serta merampungkan segala persoalan yang terdapat di dalam tubuh umat Islam. Gerakan reformasi dan modernisasi Islam merupakan pokok utama dalam kegiatan dakwahnya. Ruang lingkup dan bentuk kegiatan tabligh dilaksanakan oleh Persis dengan suatu kebijaksanaan tertentu dengan melihat pedoman dan petunjuk penyelenggaraan tabligh dan tausyiah bidang garapan tabligh untuk mubaligh dan mubalighat Persis, serta sistem pengaturan jadwal kegiatan tabligh, seperti jadwal khatib Jumat, khatib Idul Fitri, Idul Adha, dan Pengajian rutin. Adapun lingkup kegiatan tabligh Persis antara lain:

1. Melayani permintaan mubaligh Persis dari jamaah dan perorangan serta pihak lain untuk pertablighan umum dan khatib.
2. Menugaskan mubaligh atas dasar permintaan tersebut di atas.
3. Menyelenggarakan pertemuan dan penataran mubaligh dan mubalighat Persis.
4. Menyelenggarakan mubalighat para mubaligh mengenai berbagai judul yang dipandang penting.
5. Menyelenggarakan kursus-kursus, pesantren kilat, dan Tamhiedul Mubalighin.

Sedangkan kegiatannya dilakukan dengan beragam aktifitas, antara lain:

1. Pengajian rutin Pimpinan, dari tingkat Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Jamaah Persis.
2. Pengajian informal di lingkungan keluarga dengan sistem kunjungan dari pintu ke pintu.
3. Pengajian informal melalui berbagai media massa cetak dan elektronik, dialog, obrolan selintas, dan cara-cara lain yang bersifat nonformal.

4. Pengajian subuh di mesjid-mesjid Persis mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat jamaah.
5. Pengajian anak-anak di luar diniyah yang diselenggarakan di suarau-suarau dan mushala-mushala.
6. Pengajian berkala di lingkungan alumni jamaah haji Qomul Manazil yang dikelola Persis.
7. Pembuatan brosur, spanduk, pengisian rubrik dalam majalah-majalah untuk kepentingan syiar Islam dan jamiyyah Persis (Laporan PP.Persis, Muktamar X, 1990).

Dakwah para mubaligh Persis dengan melalui dakwah lisan, tulisan, dan amal perbuatan telah mencapai seluruh propinsi di Indonesia, mulai Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Irian Jaya. Demikian juga tabligh Persis ke luar negeri, melalui undangan terhadap mubaligh Pimpinan Pusat Persis, daerah asal santri, kunjungan penelitian dari luar negeri, keterlibatan Pimpinan Pusat Persis dalam alam Islami, dan menggabungkan anggota jamaah haji umum dari Mesir, Jedah, Jerman Barat, dan Australia ke dalam jamaah haji Qomul Manazil Persis. Dengan demikian, pengaruh dakwah Persis telah mencapai Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Timur Tengah, dan kota-kota di Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, dan Australia (Laporan PP.Persis, Muktamar X, 1990).

Pada masa awal Orde Baru, Persis yang dipimpin oleh Ustad Abdurahman mengajukan surat kepada pemerintah agar aktivis Islam yang menjadi tahanan politik Orde Lama dibebaskan dan melalui perwakilan khusus di Jakarta berusaha untuk memperjuangkan rehabilitasi Masyumi. Usaha ini gagal karena pemerintah Orde Baru tidak menghendaki Masyumi berdiri lagi. Selain itu, Persis menuntut segera dilaksanakannya Pemilu melalui satu ketetapan MPRS dengan menyertakan wakil-wakil masyarakat yang tidak termasuk dalam MPRS. Pemilu adalah jalan keluar yang tepat untuk memperbaiki situasi dan menciptakan pemerintahan yang representatif. Usaha Persis kembali mengalami kegagalan. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan Pemilu setelah sebelumnya selama lima tahun mengeluarkan berbagai peraturan yang melemahkan partai-partai politik.

Pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu pada 1971. Dalam menyikapi pemilu ini Persis mengeluarkan sikap bahwa:

"...kita tentu akan ikut dalam pemilu, mempergunakan hak kita sebagai warga negara, "maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu". ... Pemilu adalah hak tiap warga negara Indonesia yang sah. Oleh karena itu, adanya

Pemilu tidak bersangkut paut dengan masuk atau tidaknya menjadi suatu anggota partai politik, ... tidak ada satu pun alasan bagi siapa pun untuk ikut Pemilu dengan syarat masuk menjadi anggota suatu partai (Arsip PP. Persis, 1970).

Persis memandang bahwa hukum mengikuti Pemilu termasuk hukum yang tergantung pada 'ilahnya, yaitu apakah hal tersebut baik, buruk, manfaat, atau madharat. Dan, haram hukumnya memilih wakil dari non-Islam atau orang Islam yang sudah tidak tampak ghirah (semangat) ke-Islamannya (Arsip PP.Persis, 1970). Oleh karena itu, Pusat Pimpinan Persis menfatwakan agar suara anggota Persis sebawai warga negara diberikan kepada Partai Muslimin Indonesia (Hermawan, 1999: 200).

Selanjutnya, pada Pemilu 1977, Pusat Pimpinan Persis mengeluarkan tausyiah kepada seluruh cabang yang isinya menghimbau kepada seluruh pimpinan untuk mengikuti Pemilu secara baik dengan memilih partai yang sesuai dengan tujuan Islam atau mampu melaksanakan amanat yang baik dan tetap berpegang pada asas bebas dan rahasia dan jangan mau dipaksa atau memaksa, dan jangan mau terpancing oleh pihak luar (Arsip PP.Persis, 1977).

Tausyiah Pusat Pimpinan Persis mengenai Pemilu selalu dikeluarkan saat menjelang pemilu-pemilu Orde Baru. Tausyiah berisi arahan tentang partai mana yang layak untuk dipilih. Meskipun demikian, Pusat Pimpinan Persis tidak mengontrol secara ketat pilihan para anggotanya. Pada praktiknya hanya ada dua pilihan bagi anggota Persis, yaitu memilih partai yang dekat dengan perjuangan Islam atau tidak memberikan suara sama sekali (Hermawan, 1999: 201).

Permasalahan yang timbul pada masa Orde Baru yang dihadapi Persis adalah ketika pemerintah Orde Baru memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi sosial. Menyikapi masalah ini Persis mengacu pada kajian fikih Islam yang dikenal adanya kebolehan untuk keluar dari suatu kaidah dasar sepanjang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yusuf Qardawi mengemukakan empat pertimbangan sehingga suatu kaidah dapat ditinggalkan, yaitu :

1. Mengurangi kekejian dan kezaliman suatu hal yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Artinya, dalam perjuangan perlu melihat kemampuan yang dimiliki. Pertimbangan ini didasarkan pada Surat At-Taghabun ayat 16, "maka bertaqwalah kepada Allah menurut kemampuanmu" dan sebuah hadits Rasul; "bila kamu disuruh melakukan sesuatu, maka lakukan semampumu".

2. Memilih bahaya yang lebih ringan. Artinya, jika perjuangan dihadapkan pada dua bahaya yang merugikan, maka memilih yang lebih sedikit kerugiannya dari bahaya itu adalah lebih tepat.
3. Mundur dari yang ideal kepada kenyataan yang lebih rendah. Artinya, ketika suatu hal yang ideal tidak mampu dicapai, maka orientasi terpaksa ditujukan pada yang lebih rendah dan puas dengan apa yang mungkin dicapai setelah gagal mencapai yang ideal tersebut. Berdasarkan hal itu terciptalah suatu kaedah yang sangat populer, yaitu “dalam keadaan terpaksa boleh melakukan yang terlarang”.
4. Sunnah tadarruj. Artinya, bahwa salah satu Sunnah Allah adalah adanya suatu proses terhadap segala sesuatu yang terjadi, seperti segala sesuatu akan tumbuh mulai dari kecil, kemudian menjadi besar. Sunnah ini berlaku untuk seluruh makhluk yang ada pada alam semesta ini (Qardawi, 1977: 232-236).

Untuk menyelesaikan asas tunggal ini, akhirnya dengan terpaksa Persis mau menerima dan memasukkan Pancasila ke dalam Qanun Asasi pada tahun 1987. Mulai saat itu, Persis menghimbau kepada para mubalighnya agar tidak membahas persoalan asas tunggal dalam ceramah-ceramahnya untuk menjaga agar tidak terjadi persoalan yang lebih besar dengan pemerintah Orde Baru.

B. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) SERANG

Persatuan Islam (Persis) Serang bukan induk organisasi melainkan cabang dari Persis yang berpusat di Kota Bandung. Sebenarnya, ajaran dan paham Persis telah masuk ke daerah Serang melalui orang per orang sejak tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, tetapi belum terbentuk dalam organisasi formal resmi

Adanya infiltrasi paham Persis bukanlah yang pertama ke Serang. Jauh sebelumnya, di daerah Serang telah berdiri organisasi-organisasi massa, baik yang bersifat keagamaan Islam maupun nasionalis antara lain Sarekat Islam, Wasliyah, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Paguyuban Pasundan, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu masuk ke Serang sebelum terjadinya Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Berbeda dengan organisasi keagamaan lain yang berdiri di Serang, maka organisasi Persis Serang terbentuk secara perlahan dengan melalui proses yang panjang. Cikal bakal lahirnya Persis Serang tampak dengan hadirnya seorang

ulama yang bernama Ahmad Maryani Ismail atau lebih dikenal dengan nama Ahmar Ismail, seorang ulama kelahiran Kampung kebarahan Al Manar Serang, Banten.

Ahmad Maryani asli orang Serang Banten yang belajar agama Islam secara tradisonal. Sejak kecil ahmad Maryani belajar membaca Alquran dari ibunya yang bernama Hj Mariyah, kakak kandung K.H. Sys. Semangat Ahmad Maryani dalam belajar Agama Islam sangat besar. Setelah menginjak remaja, Ahmad Maryani belajar ke berbagai pesantren, baik pesantren yang ada di Banten maupun di luar Banten, seperti pesantren di Sukabumi dan Cianjur. Ahmad Maryani belajar ilmu fiqh dan tauhid kepada K.H. Jamhari Kaloran, dan belajar Qiroah dan tilawah Alquran kepada K.H. Sholeh Mamu Lontar. Setelah itu, Ahmad Maryani belajar kepada K.H. Halim Kasunyatan dan K.H. Syamsudin di Ciwidug Kasemen.

Setelah menimba ilmu Agama Islam ke berbagai pesantren, maka Ahmad Maryani telah menjadi ustad muda yang berilmu dan berwawasan luas. Pemikiran-pemikiran Ahmad Maryani tentang Islam, selain hasil belajar dari buku dan guru, juga berdasarkan pengalaman hidup. Pada saat menjadi guru di madrasah Irsyadul Falah, beliau melihat bahwa masyarakat masih bergaya foedal dengan diliputi oleh ketakhayulan, khurafat, taklid, ortodok, dan masih banyak yang berbau animisme, warisan leluhur nenek moyang pra Islam. Oleh karena itu, muncullah gagasan Ahmad Maryani untuk melakukan pembaharuan dalam tata ibadah di masyarakat yang sesuai dengan Alquran dan As Sunnah.

Pada tahun 1952, Ahmad Maryani mulai melakukan kegiatan pembaharuan pada masyarakat Serang. Kegiatan pembaharuan ini banyak mendapat hambatan dari masyarakat yang kurang mengerti dan masih kuatnya adat yang membelenggu masyarakat. Selama dua tahun, perjuangannya menegakkan syariat Islam berdasarkan Alquran dan As Sunnah hanya memperoleh hasil yang sangat jauh dari harapan, bahkan sebaliknya justru tersebar isu-isu yang menyebutkan Ahmad Maryani sebagai seorang Wahabi. Tudingan sebagai Wahabi itu, karena Ahmad Maryani melakukan pembaharuan yang hampir sama dengan gerakan Wahabi di Arab Saudi.

Sebagai pembaharu yang sering disebut beraliran Wahabi, Ahmad Maryani mendapat bantuan dari pamannya K.H. Syis, Nur Syu'eb, dan Ustad Waseh Kaganteran yang juga menginginkan masyarakat Banten menjadi Muslim yang dapat menjalankan agama Islam sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadist, dengan menghilangkan segala perbuatan yang berbau bid'ah. Pada masa itu, masyarakat Serang dalam menjalankan agama Islam masih banyak terbelenggu oleh fatwa-fatwa yang tidak berdasar pada Alquran dan As-Sunah dan juga berpenyakit TBC (takhayul, bid'ah, dan kurafat).

Umat Islam Serang masih banyak yang hanyut dalam arus praktek campuran antara unsur Islam dan unsur pra-Islam. Sebelum organisasi Persis telah ada yang menyerukan agar umat Islam kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, seruan-seruan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bid'ah, taqlid, dan syirik secara tegas dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bahkan ada kelompok yang beranggapan bahwa upaya dalam pemberantasan bid'ah, taqlid, khurafat, dan syirik hanya akan memecah belah persatuan di kalangan umat Islam.

Ahmad Maryani tidak sependapat dengan golongan yang seperti itu. Menurut pendapatnya, selama kaum muslimin belum kembali kepada Alquran dan As Sunnah, maka selama itu pula kaum muslimin tidak akan dapat menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan, dan membangun kekuasaan. Pandangan, keyakinan, dan perjuangan umat Islam harus berpangkal pada sebuah keyakinan bahwa tauhid tidak mungkin ditegakkan tanpa memberantas bid'ah, syirik, dan taqlid.

Selain itu Ahmad Ismail mempunyai keyakinan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang telah memberikan jaminan bahwa umat Islam tidak akan tersesat dan jatuh kelembah kehinaan dan kehancuran selama berpegang teguh (beri'tisham) kepada Alquran dan As Sunnah.

Sejarahpun telah membuktikan jika sikap, perilaku, dan pemikiran umat Islam tidak mengikuti tuntunan Alquran dan As Sunnah, malah mengikuti Imam dan madzhab dengan membabibuta, maka umat Islam akan terjerumus ke dalam taqlid, bid'ah, khurafat, dan syirik. Demikian pula, akibat dari interaksi antara Islam dengan nilai-nilai agama lain dalam perjalanan panjang sejarah perkembangannya telah mengakibatkan ajaran Islam terkontaminasi (ter-iltibas) oleh nilai-nilai bathil. Semua itu mengakibatkan kemunduran dan kehancuran umat Islam.

Tindakan dan kegiatan Ahmad Maryani yang berusaha memberantas bid'ah, syirik, dan taqlid ternyata bertentangan dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat yang masih melakukan kegiatan tersebut yang dianggapnya sesuai dengan agama Islam tidak menyukai ajaran dan kehadiran Ahmad Maryani. Sebagian masyarakat menganggap ajaran Ahmad Maryani sebagai ajaran yang salah dan menyimpang, karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak aneh apabila dalam setiap kegiatan pengajian yang dilakukan Ahmad Maryani sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, seperti dicemooh, dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu. Adanya kejadian-kejadian tersebut tidak menyurutkan dan membuat gentar semangat pergerakan kembali kepada Alquran dan As Sunnah.

Bahkan ada suatu peristiwa yang menimbulkan perkelahian masal antara anggota Persis dan masyarakat sekitar kampung Kabaharan itu yang menganggap membawa ajaran baru. Kejadian tersebut terjadi pada saat masyarakat atau anggota Persis akan melaksanakan shalat Jum'at secara rutin di masjid Al Manar. Saat itu, ketika masyarakat Kabaharan akan melakukan shalat Jum'at di dalam masjid sudah banyak jamaah yang hadir. Akan tetapi, khatib atau imam dan jamaah shalat jum'at saat itu ternyata bukan berasal dari warga setempat, melainkan dari kampung lain.

Setelah selesai shalat Jum'at, salah seorang dari jamaah yang mengaku bernama K.H. Said berasal dari Kampung Lemah Abang menyampaikan sebuah hadist. Pernyataan tersebut ditentang oleh H. Imron Halim, hingga terjadilah perdebatan antara keduanya. Pada saat situasi semakin panas, bahkan menuju ke arah pertentangan fisik muncul seorang yang dianggap sesepuh menjadi penengah antara kedua belah pihak, sehingga peristiwa yang lebih buruk dapat dihindarkan.

Pada pertengahan tahun 1950-an, jamaah pengajian Ahmad Maryani sudah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh daerah kecamatan yang ada di Serang. Dengan melihat keadaan jama'ah dan dirasakan cukup untuk membentuk sebuah organisasi maka pada tahun 1956 Ahmad Maryani mempelopori berdirinya Persatuan Islam Serang sebagai bagian dari Persis Pusat dengan nama resmi Persatuan Islam Cabang Nomor 55 Serang.

Persatuan Islam (persis) cabang Nomor 55 Serang yang baru didirikan ini dipimpin oleh Ustad Ahmad Maryani. Pada awal berdirinya Persis Serang memiliki empat daerah yaitu :

1. Serang
2. Padarincang/Gunung Gombang
3. Baros, dan
4. Kasemen (Wawancara dengan Bpk. Abdurahman)

Persis Cabang yang cukup maju adalah Kasemen dan Padarincang, karena kedua Persis cabang ini telah memiliki sekolah.

Sebagai bagian dari sebuah organisasi, sudah barang tentu Persis Serang menjalankan tujuan dan cita-cita Persis Pusat yang diwujudkan dalam Rencana Jihad sebagaimana tercantum dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persis serta memperhatikan Keputusan Directeur Van Justitie (Badan Kehakiman) Nomor: A 43/30/20 tanggal 24 Agustus 1939, maka ditetapkanlah Nizham Jam'iyah Persatuan Islam berupa Qanun Asasi (Anggaran Dasar) dan Qanun Dakhili

(Anggaran Rumah Tangga) terutama yang tercantum dalam Bab II pasal 1 sebagai berikut :

1. Mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Menghidupkan ruhul jihad dalam kalangan umat Islam.
3. Membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid, dan syirik dalam kalangan umat Islam.
4. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islamiyah kepada segenap lapangan masyarakat.
5. Mengadakan, memelihara, dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya untuk memimpin peribadatan umat Islam menurut sunnah nabi yang sebenarnya menuju kehidupan taqwa.
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putera-puteri Islam dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami (PP. Persis, 1957:6-7).

Secara ringkas, tujuan Persis pada dasarnya adalah menginginkan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan untuk :

1. Menyelamatkan aqidah umat dan menyelamatkan umat dalam beraqidah.
2. Menyelamatkan ibadat umat dan menyelamatkan umat dalam beribadat.
3. Menyelamatkan muamalah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah, dengan jalan:
 - 3.1 Mengembangkan dan memberdayakan potensi jam'ayyah demi terwujudnya jam'iyyah sebagai surotun mushagaratun anil Islam wa hikmatuhu al asma.
 - 3.2 Meningkatkan pengamalan dan pemahaman keislaman anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya sehingga tercipta barisan ulama, zuama, ashaban, dan hawariyun Islam yang senantiasa iltizam terhadap Risalah Allah.
 - 3.3 Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam bermuamalat secara jamai dalam setiap aspek kehidupan (Dadan Wildan, 2000:41).

Pada tahun 1960-an, Persis Serang mendapat angin segar, pada saat Kabupaten Serang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tb. Saparudin. Pada saat itu, Ahmad Maryani kembali dipilih sebagai ketua Persis Serang dan dipercaya

oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengelola Baitul Maal dan menjadi pengurus majalah Al Amanah. Bahkan, Ahmar Ismail menyarankan agar dibentuk Koperasi Kesejahteraan untuk membantu keadaan ekonomi para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu, pemimpin Persis Serang ini telah ikut terlibat aktif dalam upaya menghilangkan aliran kepercayaan “Kerukunan” di forum Majelis Ulama Kabupaten Serang.

Persis Serang sebagai organisasi baru lebih banyak melakukan kegiatan pengajian untuk menambah kuantitas jamaah. Hal ini dilakukan karena minimnya dana dan susahnyanya untuk mendapatkan anggota yang baru. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya tekanan dari pejabat-pejabat pemerintah tertentu (oknum pejabat) yang merasa kepentingannya terganggu, terutama pejabat yang berindikasi dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Situasi dan keadaan tersebut dapat terjadi karena pada awal tahun 1960, di Indonesia peran politik kelompok-kelompok Islam makin lama semakin menciut, apalagi setelah dibubarkannya Masyumi. Pada masa itu, pemerintah Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin yang menginginkan adanya persatuan nasioanlis, agama, dan komunis. Adanya ide tersebut, sebenarnya merupakan pembelengguan peran partai Islam dalam pemerintahan, di pihak lain Partai Komunis berkembang menjadi partai yang paling populer dengan memiliki banyak anggota dan simpatisan dari masyarakat awam, serta berhasil menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan Soekarno, bahkan menjabat sebagai menteri negara, seperti D.N. Aidit.

PKI sebagai organisasi komunis selalu berupaya dengan segala cara untuk menjatuhkan saingannya, terutama kelompok Islam sebagai musuh utama. Akibat manuver politik yang dilakukan PKI, telah menyebabkan banyak diantara para pemimpin Masyumi dan PSI ditangkap dan dipenjarakan. Tokoh-tokoh Islam tersebut difitnah atas tuduhan keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI, seperti Mohamad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Burhanudin Harahap, Isa Anshary, E.Z. Muttaqien dan lain-lain (Dadan Wildan, 2000:131).

Agitasi dan provokasi yang dilakukan PKI di pusat sebagai langkah konfrontasi dengan kelompok Islam yang menjadi saingan utamanya, juga dilakukan oleh PKI di daerah-daerah, termasuk di Serang. PKI Serang yang berusaha mendekati kaum petani, ditandingi oleh kelompok Islam, termasuk Persis yang menggiatkan pembinaan ke dalam jamaah. Selain itu, Persis Serang sebagai bagian dari Persis Pusat berusaha untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat di Bandung. Berdasarkan kebijakan Persis Pusat, maka Persis Serang dengan tegas menolak konsep Nasakom. Sebab agama

dan komunis tidak dapat disatukan, karena antara kedua bagaikan air dan minyak. Sementara itu, rakyat Serang diingatkan agar merapatkan barisan dengan kekuatan iman.

Pada tanggal 4 Maret 1957 PP Persis mengeluarkan manifesto politik yang ditandatangani oleh Isa Anshary sebagai Ketua Umum dan K.H.E. Abdurahman sebagai Sekretaris Umum. Dalam manifesto itu dinyatakan bahwa teori dan praktek komunis bukan saja bertentangan dengan semua agama, tetapi mengandung permusuhan dan pertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, menolak konsepsi Bung Karno yang ingin memasukkan komunis untuk ikut memegang kendali pemerintah di Indonesia. Penolakan Persis itu berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak konsepsi Bung Karno yang hendak membawa ikut sertanya kaum komunis ke dalam pemerintahan Republik Indonesia.
2. Menasehatkan kepada Bung Karno sesuai dengan jiwa “demokrasi Indonesia asli” yang beliau anut, agar beliau tidak memaksakan diri untuk melaksanakan konsepsinya itu, karena bertentangan dengan pendirian dan keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia dan pasti akan membawa negara dan rakyat Indonesia kepada kehancuran.
3. Mengajak kepada segenap ulama, mujahidin Islam Indonesia agar merapatkan barisan, melakukan jihad, tantangan dan perlawanan total dan frontal terhadap ideologi komunisme, dengan cara teratur dan tersusun.
4. Menyerukan terhadap segenap kaum nasionalis yang masih murni, kaum sosialis yang masih sehat, agar bersama-sama kaum muslimin membendung bahaya komunisme di Indonesia di Indonesia, menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia (PP Persis).

Penolakan konsepsi Soekarno oleh Persis cabang yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Persis Serang. Selanjutnya, Persis seluruh Indonesia bersepakat di dalam kongres Persis yang dilaksanakan pada tahun 1960, mengusulkan agar Presiden Soekarno menghapuskan Partai Komunis. Usulan Persis tersebut sudah barang tentu tidak dikabulkan oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, Soekarno semakin erat dengan komunis seperti nampak dalam berbagai kebijakan selalu menguntungkan PKI. Adanya situasi yang tidak menguntungkan bagi Persis ini semakin memberatkan, karena di dalam tubuh Persis sendiri sedang terjadi konflik antar para pemimpin Persis Pusat

Adanya konflik di Persis pusat telah pula melemahkan semangat dan eksistensi Persis Serang. Jihad perjuangan Persis dihadapkan pada masalah-

masalah politik yang beragam, pembubaran Partai Masyumi oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap kontra revolusi (Persis sebagai anggota istimewa Masyumi), dan ancaman akan dibubarkannya Persis karena tidak memasukan asas nasakom dalam Qanun Asasi Persis merupakan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Persis.

Para ulama dan mubaligh muda Persis Serang berusaha membendung pengaruh komunis dengan mengadakan berbagai kegiatan tabligh berkeliling ke berbagai daerah yang ada di Serang. Pada saat bertabligh tersebut para ulama mempunyai cara dan gaya tersendiri, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Upaya ini bukan hanya dilakukan oleh mubaligh Persis saja, tetapi oleh seluruh pimpinan anggota Persis Serang beserta organisasi otonom lainnya seperti Pemuda Persis berupaya menghadapi dan membendung Komunisme Indonesia yang berkembang di daerah Serang.

Dalam melakukan dakwahnya, para ulama dan mubaligh muda Persis Serang sangat berani. Selain di daerah-daerah yang masih bersih dari pengaruh komunis, mereka pun menyusup ke daerah-daerah yang telah dikuasai atau dipengaruhi oleh PKI, bahkan ke rumah-rumah orang PKI. Kegiatan infiltrasi ke daerah-daerah yang mayoritas berada di bawah pengaruh PKI ternyata membawa hasil yang cukup memuaskan. Banyak diantara warga masyarakat Serang yang semula telah terpengaruh oleh faham komunis, kembali ke ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Kegiatan para ulama dan mubaligh muda Persis tersebut, membuat para tokoh dan pemimpin PKI di daerah Serang menjadi marah. Untuk meredam kegiatan mereka pimpinan PKI Serang, mengajak pemuda Persis untuk bekerja sama dan bergabung ke dalam Badan Kerja Sama dan Pemuda dan Militer (BKSPM) yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Persis Serang karena di dalam badan tersebut bergabung organisasi Pemuda Rakyat yang merupakan underbauw PKI.

Persis Serang mempunyai pendirian yang sama dengan Persis Pusat, yakni jika Pemuda Rakyat keluar dari BKSPM maka Pemuda Persis Serang akan masuk atau sebaliknya jika Pemuda Rakyat masuk maka Pemuda Persis berdiri di luar, karena haram hukumnya bekerjasama dengan komunis.

Melihat situasi yang tidak menguntungkan tersebut, PKI segera membuat manuver dengan fitnah dan tuduhan melawan pemerintahan yang syah, sehingga pimpinan Persis Cabang Serang ditangkap oleh tentara. Oleh karena itu, Ahmar Ismail dan MN. Jailani (Sekjen Pemuda Persis Serang) harus meringkuk di dalam jeruji besi di kantor Resort Serang.

Namun demikian perjuangan umat Islam Serang umumnya dan Persis khususnya, dalam melawan pihak komunis yang ingin menghancurkan Islam terus berlanjut. Pada tahun 1965, di daerah Kabupaten Serang terdapat gabungan dari ormas dan orpol yang disebut BKSPI (Badan Kerja Sama Pemuda Islam). Pada awalnya, BKSPI ini dibentuk untuk menggabungkan berbagai organisasi pemuda Islam yang ada di daerah Serang. Tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk menyatukan visi dan misi dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari rongrongan paham komunis. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata keberadaan organisasi pemuda ini tidak terlepas dari organisasi agama lain yang mempunyai tujuan yang sama. Badan inipun tidak terlepas dari rongrongan paham komunis, karena dari 17 organisasi yang masuk menjadi anggota terdapat pula PKI dan organisasi lainnya yang berada di bawah pengaruh PKI antara lain Soksi dan Sobsi. Adapun organisasi pemuda yang menjadi anggota BKSPI adalah sebagai berikut :

1. Persis (Persatuan Islam) Serang
2. Muhamadiyah Wilayah I Banten di Serang
3. Perti (Partai Islam)
4. PSII (Partai Serikat Islam Indonesia)
5. NU (Nahdlatul Ulama)
6. Wasliyah
7. Hisbulwathon
8. GP Anshor
9. Partai Muslimin Indoneia
10. Partai Nasionalis Indonesia
11. Partai Komunis Indonesia
12. Partai Murba/Marhaenis
13. Partai Kristen Indonesia
14. Partai Indonesia Raya
15. Partai Sobsi (Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)
16. Partai Soksi (Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) (M. Ishmet Aly, TT:f)

Dalam bidang budaya, masyarakat Serang Banten memiliki seni budaya dan adat tradisi yang khas dan banyak memiliki pendukung di masyarakat. seni yang banyak diminati dan dikembangkan adalah seni debus. memang ada sebagian kelompok Islam yang menganggap seni ini sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan Agama Islam. Potensi masyarakat ini dimanfaatkan oleh PKI yang membentuk organisasi Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra). Sebuah lembaga yang menghimpun, mempersatukan dan mengarahkan para seniman dalam berkarya seni.

PKI dengan Lekra-nya telah berhasil mendapat simpati dan bahkan sebagian seniman mendukungnya dengan masuk menjadi anggota Lekra. Seniman dan budayawan ini kemudian dijadikan alat propaganda yang efektif dalam mempengaruhi masyarakat.

Melihat perkembangan PKI dengan Lekra-nya membuat organisasi dan partai-partai Islam sangat khawatir. Oleh karena itu, untuk membendung infiltrasi paham komunis terhadap seniman dan budayawan maka organisasi Islam, termasuk Persis Serang merencanakan mengadakan musyawarah besar seniman dan budayawan se-Banten. Musyawarah ini sebagai upaya konsolidasi ke dalam agar seniman dan budayawan Banten tidak terpengaruh dan ikut gerakan komunis.

Musyawarah Besar Seniman dan Budayawan se-Banten dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 1965 di Serang. Pembukaannya dilakukan di gedung Bioskop Pelita dan penutupan di gedung SMA Negeri I Serang. Musyawarah Besar Seniman dan Budayawan se-Banten ini dihadiri oleh utusan yang mewakili daerah-daerah :

1. Kabupaten DT II Serang, termasuk Ciomas, Cikande, Kotif Cilegon, Merak, dan Anyer.
2. Kabupaten DT II Pandeglang termasuk Saketi, Bojongdatar, Kertaraharja, Teluk Lada, Pasir Waringin, Sodong, Subang, Cikeusik, Tanjunglesung, Cileles, Cibeo, Bayah, Cisolok, Malingping, Cibaliung, Sumur, Citeureup, Labuan, Carita, dan Karang bolong.
3. Kabupaten DT II Lebak Rangkasbitung termasuk Jasinga.
4. Serta daerah Tangerang (dimasukan ke daerah Wikayah III Banten) (Wawancara dengan Bpk Abdurachman).

Persis Serang sebagai organisasi Islam sangat mendukung adanya musyawarah seniman dan budayawan ini. Ketua Persis Serang Ahmad Maryani dan M. Ishmet Aly ikut aktif dalam Musyawarah Besar Seniman dan Budayawan Banten. Dalam Mubes tersebut, Ahmar Ismail menjadi ketua Team Perumus Hasil Mubes, sedangkan M. Ishmet Aly menjadi Sekjen dan Bagian Keuangan Mubes.

Mubes Seniman dan Budayawan se-Banten yang bertujuan menyatukan visi dalam menangkal pengaruh komunis, hasil-hasilnya tidak diketahui umum dan belum atau tidak dipublikasikan karena keadaan pada saat itu yang tidak memungkinkan. Pada hari terakhir kegiatan Mubes, situasi Mubes sudah tidak menentu karena pada saat yang bersamaan terjadi peristiwa G 30 S/PKI di Jakarta dengan adanya pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat dan pengumuman PKI tentang penguasaan negara. PKI di daerah-daerah mengikuti

langkah gerakan di Jakarta dengan bergerak dengan melakukan pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan dan juga diikuti oleh penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik, terutama para ulama atau ustad pengajar agama Islam.

Akibat peristiwa ini, di Serang banyak yang berpredikat kiai, santri, ustad, dan alim ulama yang dibunuh oleh orang PKI, Pemuda Rakyat, dan gerwani. Para ustad dan kader Persis-pun banyak yang menjadi korban kebiadaban komunis dan tokoh-tokoh Islam yang selamat segera bersembunyi untuk sementara, sebelum bergerak melakukan perlawanan bersama kesatuan aksi

Gerakan G 30 S/PKI di Jakarta yang eksekusinya telah merembes ke berbagai daerah termasuk Serang dalam bentuk rasa ketakutan, dan penderitaan rakyat khususnya umat Islam, akhirnya mendapat reaksi dari pemuda dan mahasiswa yang anti komunis. Setelah TNI dan rakyat berhasil menghancurkan gerakan G 30 S/PKI maka kesatuan aksi seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) dan organisasi massa lainnya, melakukan aksi turun ke jalan menyerukan pembubaran PKI dan antek-anteknya dalam rangka perjuangan menegakkan Tritura.

Gerakan aksi mahasiswa, pelajar, organisasi massa lainnya ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Serang. Para pemuda dan tokoh Persis Serang aktif bersatu dengan organisasi Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah, serta mahasiswa dan pelajar, melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur komunisme di Serang. Akhirnya, gerakan aksi seluruh Indonesia tersebut berhasil dengan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia oleh penguasa baru, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

Adanya penggantian pemerintahan ini menandakan lahirnya pemerintahan baru yang dikenal dengan nama Orde baru, tindakan penguasa baru yang melakukan pelanggaran dan penangkapan para pemimpin PKI, baik di pusat pemerintahan yaitu Ibukota Jakarta maupun di daerah-daerah telah menimbulkan harapan baru di kalangan umat Islam untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, yang mempunyai keinginan membangkitkan eksistensi organisasi melakukan tindakan pengawasan ketat anggota Persis. Pengawasan ini dilakukan selain menghendaki dan mengutamakan pelaksanaan pengalaman ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga menghendaki kualitas pelaksanaan disiplin organisasi yang berdasarkan Qanun Asasi, Qanun Dakhili, peraturan, tausiyah, dan tata kerja yang berlaku dalam organisasi.

Pengasawan yang ketat ini mempunyai tujuan untuk menyelamatkan jam'iyah Persis. Pada awal pasca pemberontakan G 30 S\PKI sering terjadi pemalsuan nama jam'iyah Persis untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Persis. Diberbagai daerah seperti Serang, Persis dijadikan tempat berlindung untuk menyelamatkan dari bagi keterlibatannya dalam peristiwa G 30 S\PKI. Hal ini dilakukan karena Persis dikenal sebagai organisasi yang paling menentang komunis.

Adanya pemerintahan Orde Baru yang diharapkan dapat memberi keluasaan dalam bergerak bagi Persis ternyata malah sebaliknya. Pemilu pertama masa Orde Baru telah disalah gunakan dengan aturan hanya diikuti oleh beberapa partai tertentu dan Golongan Karya saja, sehingga beberapa organisasi Islam seperti Persis menjadi lemah Apalagi setelah Orde baru menjalankan azas tunggal bagi seluruh organisasi yaitu Pancasila.

: Adanya azas tunggal itu telah membuat Persis tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan kegiatannya, sehingga kegiatan Persis menjadi berkurang yang berarti pula melemahnya organisasi Persis.

Melemahnya eksistensi Persis, tidak saja terjadi pada PP Persis melainkan pula melanda Persis Cabang seperti Cabang Serang. Pada saat H. Ahmad Syafei masuk menjadi pengurus Persis, keadaan organisasi Persis Serang ini sudah tidak terurus. Sebagian besar pengurus vacum dan hanya Ahmad Maryani dan Ust. Ma'mun, yang masih aktif walaupun hanya untuk menjaga kekosongan kepengurusan organisasi.

Untuk menghidupkan kembali kegiatan Persis Serang, H. Ahmad Syafei menerapkan strategi pengembangan dengan cara bertahap. H. Syafei berusaha mengikuti dan mengubah tata cara yang ada dengan tidak menonjolkan nama organisasi, tetapi tetap menggunakan pedoman Qanun Asasi Persis. Menurut H. Syafei, tidak usah mengibarkan bendera Islam, tetapi tegakkan tauhid Islam.

Program jihad jam'iyah Persatuan Islam disusun dan diarahkan untuk mencapai tujuan jam'iyah, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kaffah (utuh/menyeluruh) dalam segala aspek kehidupan supaya :

1. Setiap anggota jam'iyah Persatuan Islam mengamalkan ajaran Islam menurut tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Sebagian anggotanya menjadi thaifatun mutafaqqihuna fidien (sekelompok orang yang memperdalam agama) atau ulama.

3. Setiap anggota jam'iyyah Persatuan Islam bersama umat Islam Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat khaira ummah menuju masyarakat yang diridhai Allah Swt.
4. Umat Islam menempatkan dirinya pada aqidah, syariah, dan akhlak Islam menurut tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5. Umat Islam menjadi hamba Allah Swt. yang bertaqwa kepadaNya (PP Persis, 2000-2005).

Dengan adanya program tersebut, dapat dipahami apabila anggota Persis diharapkan tidak hanya sebagai anggota semata-mata, melainkan juga bertindak sebagai mubaligh. Dalam arti menjadi juru da'wah, dan penyampai risalah Rasulullah Saw kapan dan dimana dalam segala bidang, ruang, dan waktu.

Dalam praktek da'wah, Persis Serang lebih berorientasi ke dalam, yaitu kepada umat Islam sendiri dan menyelesaikan serta merampungkan segala persoalan yang terdapat dalam tubuh umat Islam. Ruang lingkup dan bentuk kegiatan tablig dan tausyiah yang dilaksanakan Persis Serang, dilaksanakan dengan suatu kebijaksanaan dengan melihat pedoman dan petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan kebijakkan Persis Pusat.

Adapun kegiatan tablig Persis Serang disesuaikan dengan program Persis Pusat, tetapi juga dengan melihat situasional setempat. Kegiatan tabligh Persis dilakukan dengan cara :

1. Pengajian rutin pimpinan, dari tingkat Pimpinan Pusat hingga pimpinan Jama'ah.
2. Pengajian informal di lingkungan keluarga dengan sistem kunjungan dari pintu ke pintu.
3. Pengajian informal melalui berbagai media massa, dialog, obrolan, dan cara-cara lain yang bersifat non formal.
4. Pengajian subuh di masjid-mesjid Persis dari tingkat pusat sampai tingkat jama'ah (Dadan Wildan, 2000:163).

Perlahan tapi pasti, tahun-tahun kelam Persis akibat situasi politik di Indonesia tidak menentu mulai ditinggalkan. Persis Serang mulai bangkit kembali dengan kegiatan rutin seperti di atas dan juga melalui lembaga pendidikan sekolah. Pengajian-pengajian dan tablig Persis Serang dilakukan tidak hanya di Kota Serang, tetapi ke luar kota antara lain Rangkasbitung, Pandeglang, Pasir Manggu, Gunung Buntung, Cilegon dan lain, eksistensi Persis muncul kembali. Bahkan pada saat itu, Ahmad Maryani diberi kepercayaan oleh Bupati DT II Serang yaitu H. Tb. Saparuddin untu mengelola Baitul Mal Serang. Bahkan tidak saja sampai

disitu, H. Ahmad Maryani mendapat tugas untuk berdialog dengan salah seorang tokoh sebuah aliran kepercayaan melalui sidang DPRD Serang.

Melihat situasi yang menguntungkan, dan demi meningkatkan pengembangan usaha dakwah sebagaimana yang diemban oleh setiap anggota Persis, maka pada 1995 dibentuklah Pimpinan Daerah Kabupaten Serang. Pada saat yang bersamaan dibentuk pula pimpinan Cabang Persis ke 213 dan 214 Cabang Kasemen di Keganteran dan Cabang Curug di Karang Kitri, Baros.

Adapun susunan pengurus Pimpinan Daerah Persis Serang Periode 1995 itu adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. H. Ahmad Syafei AN
Wakil	:	Kasman DM
Sekretaris	:	A.M. Rahman
Wakil Sekretaris	:	Abdul Syukur
Bendahara	:	H. Hanapi
Ketua Bidang Garapan	:	
1. Pendidikan	:	Drs. M. Abdurahman
2. Tabligh	:	Rakhmat Jaelani
3. Bimbingan Haji	:	H. Hariri Karim
4. Perzakatan	:	Memed
5. Sosial Ekonomi	:	H. Memed Nasri

Ketua Bagian Otonomi:

1. Peristri	:	
Ketua	:	Oom Handanah
Sekretaris	:	Icah Aisyah
2. Pemudi	:	
Ketua	:	Imas Masyitoh
Sekretaris	:	Dra. Yeti Handiyeti
(wawancara dengan Drs H. Ahmad Syafei, Mei 2002)		

Susunan pengurus Pimpinan Daerah tersebut di atas mengacu kepada Qanun Asasi PP Persis Bab I pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan jihad jam'iyah cabang-cabang di daerah kerjanya.

2. Pimpinan Daerah diadakan apabila disuatu kabupaten/Kota/ Kotif sudah terbentuk sedikitnya tiga Pimpinan Cabang.
3. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat membentuk Pimpinan Daerah sekalipun belum memenuhi ketentuan ayat 2.
4. Ketua Pimpinan Daerah Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah.
5. Ketua Pimpinan Daerah dapat menyusun tasykil Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Pimpinan Pusat untu masa empat tahun.
6. Pimpinan Pusat dapat mengdelegasikan pengesahan Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah.
7. Pimpinan Daerah terdiri atas :
 - 7.1 Pimpinan Harian : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara.
 - 7.2 Pimpinan Lengkap : Pimpinan Harian ditambah Ketua Bidang Garapan, para Ketua Bagian Otonom dan para Ketua Pimpinan Cabang.
8. Pimpinan Daerah bertanggung jawab pada Musyawarah Daerah dan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah yang telah disahkan Musyawarah Daerah tersebut itu diserahkan kepada Pimpinan Pusat dan tembusan ke Pimpinan Wilayah.
9. Ketua Pimpinan Daerah adalah anggota Musyawarah Lengkap Pimpinan Wilayah (PP. Persis, 2002).

Program utama dari dari PD Persis Serang adalah melaksanakan jihad jam'iyah dari PP Persis yang disusun dan diarahkan untuk mencapai tujuan jam'iyah, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kaffah (utuh/menyeluruh) dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mencapai tujuan jam'iyah tersebut disusun rencana Jihad Jam'iyah Persatuan Islam. Rencana jihad disusun sebagai berikut :

1. Dalam lingkungan anggota ialah dengan mendidik dan membina para anggota jam'iyah Persatuan Islam untuk :
 - 1.1 Menjadi Uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat dalam mengamalkan syariat Islam.
 - 1.2 Menjadi ulama, zuama, ashabun dan hawariyun Islam dengan jalan memperkaya ilmu dan memperdalam pengertian tentang ajaran Islam sehingga mampu bertindak sebagai mubaligh dan mubalighat.

- 1.3 Mengadakan, memelihara, dan memakmurkan mesjid, mushala, dan wakaf.
 - 1.4 Mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 - 1.5 Mengadakan dan mengembangkan perpustakaan Islam.
 - 1.6 Melaksanakan penelitian dan pengkajian ilmiah keislaman dalam rangka memelihara dan mengembangkan ruhul jihad, ijtihad, dan tajdid.
 - 1.7 Mengadakan dan mengembangkan penerbitan keagamaan sebagai salah satu media dakwah.
 - 1.8 Memelihara keutuhan jam'iyah dan mengembangkannya.
 - 1.9 Menjadi pelopor dan pelaksana ikramul aitam.
 - 1.10 Mendirikan lembaga kesehatan Islami.
 - 1.11 Mendirikan lembaga-lembaga ekonomi Islami.
 - 1.12 Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sejalan dengan tujuan jam'iyah.
- 2 Dalam lingkungan umat dengan jalan membina tatanan masyarakat muslim menuju masyarakat khaira ummah dengan cara :
- 2.1 Melaksanakan aktivitas dakwah melalui berbagai cara dan media yang ma'ruf.
 - 2.2 Membela dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan musuh-musuh Islam dengan cara haq dan ma'ruf.
 - 2.3 Menghidupkan dan memelihara ruhul jihad, ijtihad dan tajdid.
 - 2.4 Membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid, syirik, dan munkarat lainnya.
 - 2.5 Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan segenap organisasi Islam lainnya, baik nasional maupun internasional sebagai perwujudan prinsip kaljasdil wahid dalam menuju terwujudnya bunyanul Islam (PP. Persis, 2000-2005).

Demikianlah, Persis Serang dalam masa kepemimpinan H. Syafei dari Kebaharan berusaha menatap masa depan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi jama'iah. Kegiatan Persis diutamakan pada gerakan dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial.

C. KIPRAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) SERANG DALAM PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM DI SERANG

Persatuan Islam sejak awal berdiri pada tanggal 12 September 1923 dimaksudkan sebagai organisasi sosial yang bergerak dalam pembersihan Islam dari unsur-unsur non Islam seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Maksud Persis ini tetap dipegang dan akan terus dilaksanakan sehingga tercapai masyarakat

yang melaksanakan Syariat Islam yang benar sesuai dengan tuntutan dan pedoman Alquran dan As Sunah.

Demikian pula, Persis Serang sejak pertama berdiri selalu menekankan pemberantasan penyakit “TBC” (Takhayul, Bid'ah, dan Churafat) yang kronis dalam masyarakat Serang khususnya dan Banten umumnya (Wawancara dengan Ustad Abdurahman). Adanya penyakit ini berkaitan erat dengan sistem budaya dan tradisi masyarakat setempat yang telah mengakar kuat dan bahkan dianggap tidak bertentangan dengan Islam.

Oleh karena itu, program Persis Serang yang dipelopori oleh KH. Ahmad Maryani dari Kebaharan, sejak tahun 1950 selalu melakukan dakwah pembahasan dan pembangunan umat Islam dengan merombak aqidah yang sesuai Alquran dan As Sunah. Gerakan pembaharuan ini dianggap oleh masyarakat dan dihembuskan oleh kelompok tertentu sebagai Gerakan Wahabi. Gerakan ini ditakuti oleh rakyat karena rakyat pada saat itu pendidikannya rendah sehingga gerakan ini dianggap akan mengikis habis adat yang mereka anut selama ini. Oleh karena itu, pengajian yang dilakukan oleh Ahmad Maryani pada dekade 1950-an hanya diikuti oleh jamaah yang sedikit, karena masyarakat masih takut.

Perkembangan Persis Serang sejak berdiri tahun 1956 sampai masa dekade awal pemerintahan Orde Baru kurang dapat berkembang dengan baik. Pada masa Orde Lama dengan adanya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin telah membelenggu gerakan Persis Serang. Pada masa itu, komunislah yang mempunyai ruang gerak yang lebih luas karena lobi mereka di dalam pemerintahan pusat.

Kebangkitan Persis Serang atau lebih tepatnya mulai leluasnya kegiatan Persis Serang terjadi pada tahun 1980-an dan terutama setelah Persis Serang dipimpin oleh H. Syafei. Oleh H. Syafei, Persis Serang berusaha diaktifkan kegiatannya dengan menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari Persis Serang seperti Pemuda Persis, dan Peristri (Persatuan Islam Istri).

C.1 Organisasi Pemuda Persis Serang

Organisasi Pemuda Persis Serang pada awal berdirinya Persis Serang tahun 1956 belum ada bentuknya sama sekali. Keadaan itu disebabkan jumlah jamaahnya sendiri sangat terbatas. Oleh karena itu, Organisasi Kepemudaan Persis Serang tidak jelas keberadaannya.

Kegiatan Pemuda Persis tampak menonjol pada tahun 1965 walaupun bukan dalam bentuk organisasi kepemudaan Persis Serang yang formal. Pemuda-pemuda Persis pada saat itu bergerak dengan menggabungkan diri dalam kesatuan aksi menentang G30 S/ PKI dan Perjuangan Tritura.

Gerakan Pemuda Persis Serang tampak pula dalam peristiwa penghancuran pabrik gula palm di daerah Kebaharan, tidak jauh dari Masjid Al Manar Persis. Peristiwa berasal dari teror senjata yang dilakukan oleh oknum camat terhadap H. Ahmad Maryani. Oknum camat tersebut akan mengubur kepala kerbau pada saat pendirian pabrik palm yang ditentang keras oleh masyarakat setempat yang umumnya jamaah Persis. Oleh karena itu, terjadi insiden pembakaran pabrik palm oleh pemuda dan rakyat jamaah Persis yang menganggap kehadiran pabrik tersebut cenderung tidak baik karena diawali oleh kegiatan yang musyrik.

Pada era kepemimpinan Persis Serang di bawah H. Syafei berusaha membangkitkan kegiatan Pemuda Persis. Struktur organisasi Pemuda Persis yang telah disusun dan disepakati ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini terjadi karena pimpinan pemuda Persis yang terpilih tidak dapat melaksanakan program yang telah dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, keadaan organisasi pemuda Persis Serang itu perlahan-lahan akhirnya bubar dengan sendirinya.

Pada saat sekarang ini tidak diketahui keadaan organisasi pemuda ini.

C.2 Persatuan Persis Istri (Persistri)

Persatuan Islam Istri (Persistri) merupakan organisasi istri para anggota Persis. Persistri merupakan organisasi istri para anggota Persis. Persistri merupakan hasil konferensi atau muktamar Persis ketiga pada tanggal 24-25 Desember 1936. Persistri walaupun sebagai bagian dari Persis, tetapi dalam kelembagaannya dan kegiatan sehari-hari bersifat otonom atau berdiri sendiri.

Sebagai organisasi yang berdiri sendiri Persistri memperoleh badan hukum No A. 43/30/20 tertanggal 15 Agustus 1939. Persistri Pusat kemudian membentuk Persistri daerah, termasuk diantaranya Persistri Cabang Serang. Pada saat ini, Persistri Serang telah dibentuk secara resmi dengan pengurusnya yang tetap. Pengurus Persistri Serang periode Jihad 1995-1999 diketuai oleh Oom Hamdanah dengan Sekretarisnya Icah Aisyah. Kegiatan Persistri Serang diupayakan untuk sejalan dengan Persistri Pusat dengan tetap mengacu pada program Persis Serang.

Kegiatan utama Persistri Serang adalah pembinaan ke dalam, dengan melakukan pengajian dan diskusi agama bagi ibu-ibu dan remaja putri. Menurut H. Syafei dan istri, bahwa kegiatan Persistri antara lain :

- a) Pengajian rutin ibu-ibu yang dilaksanakan secara bergilir di setiap cabang kecamatan.
- b) Pembinaan mubalighoh.
- c) Melakukan kegiatan shalat berjamaah di kalangan ibu-ibu.
- d) Ikut aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Persis, seperti pengajian umum, dan sunatan massal.



C.1.1.1 Pengajian ibu-ibu yang dilakukan oleh Persistri Serang

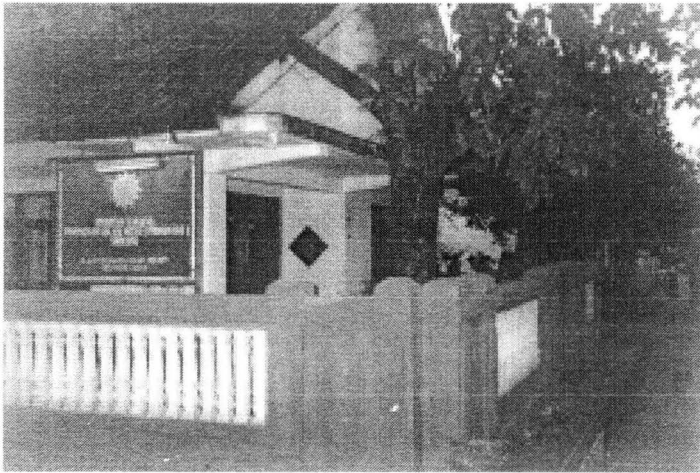
C.3 Kegiatan Persis Serang

Kegiatan Persis Serang, dalam pembinaan umat, selain dilakukan melalui organisasi turunannya, juga dilakukan melalui kegiatan yang langsung di bawah koordinasi Persis Serang.

Persis Serang dalam perkembangannya berhasil menyebarkan paham dan ajaran Persis ke seluruh daerah Serang, bahkan ke Rangkasbitung. Pada saat ini, Persis Serang telah memiliki beberapa cabang antara lain Persistri Cabang Serang, Padarincang, Baros, dan Kasemen.

Persis cabang yang cukup maju adalah Cabang Kasemen dan Padarincang, karena telah memiliki sekolah. Sementara itu, Persis Cabang Rangkasbitung dimasukkan ke dalam Persis Cabang Serang.

Persis Serang masa kepengurusan H. Syafei ini mengalami perkembangan yang pesat dengan aktif melakukan kegiatan utama untuk memperkuat anggota jamaah dan meningkatkan jumlah jamaah. Sesuai dengan tuntutan jaman, Persis Serang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi.



Kantor PD Persis Serang

C.4 Kegiatan Pendidikan Persis Serang

Persatuan Islam (Persis) yang notabene sebagai organisasi masa keagamaan tentunya mengembangkan pendidikan yang berciri khas Islam sesuai dengan dasar pendidikan jam'iyah yaitu pendidikan berdasarkan Alquran dan Assunah. Pendidikan yang berciri khas Islam itu senantiasa merujuk kepada wahyu Allah subhanahu wata'ala. Adapun tujuan pendidikan yang dilakukan oleh Persatuan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, beramal saleh, dan berahlak mulia. Seperti ketika Rasulullah saw. menyebarluaskan ajaran Islam pada hakekatnya apa yang beliau lakukan adalah bertujuan untuk membentuk manusia

agar memiliki kepribadian dan ahlak mulia, sebagai perwujudan insan takwa dengan indikasi beriman, berilmu, dan beramal saleh. Dengan menyadari bahwa hakekat manusia adalah makhluk individu, sosial, moralitas, dan religius, maka upaya untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan melalui pendidikan.

Pendidikan yang dilakukan Persis telah dirintis sejak tahun 1924. Secara umum, Persis telah memiliki banyak lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang dikelola oleh Persis Daerah. Adapun tujuan pendidikan Persis pada awalnya adalah:

- a. Mempersiapkan calon-calon ulama yang tidak kaku menghadapi masyarakat.
- b. Menghasilkan mubaligh-mubaligh yang memiliki kemampuan serta kesanggupan menyiarkan Agama Islam.
- c. Menghasilkan mubaligh-mubaligh yang sanggup dan tangguh dalam membela dan mempertahankan Agama Islam.
- d. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang sebenarnya (Edi S. Ekadjati, 1986:94).



Pondok Pesantren yang dikelola PD Serang

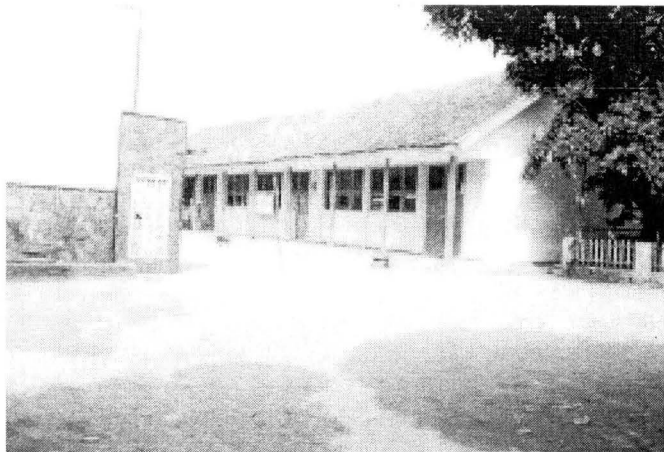
Selanjutnya, landasan pendidikan yang dirujuk oleh Persatuan Islam (Persis) adalah firman Allah dalam Surat Al Mujadilah ayat 11 yang menyatakan bahwa "Dia (Allah) akan meningkatkan kedudukan sebagian orang-orang yang beriman

dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Landasan inilah yang dijadikan pegangan oleh Persatuan Islam dalam bidang pendidikan. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa menuntut ilmu, bersekolah, berpendidikan adalah kewajiban bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pendidikan digunakan untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia beriman, berilmu, beramal saleh, dan berahlak mulia. Sedangkan tujuan pendidikan Persatuan Islam (Persis) adalah untuk mewujudkan kepribadian muslim muttaqi (muslim yang bertakwa) yang tafaqquh fiddien (kukuh dan berpegang teguh pada agamanya) sesuai dengan jenjang bentuk satuan pendidikan yang diselesaikannya.



Taman Kanak-kanak Al Manar Persis Serang

Upaya yang dilakukan oleh Persatuan Islam Serang dalam bidang pendidikan adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Persatuan Islam (Persis) sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, baik pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak), pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi. Selain itu, Persis Serang pun mendirikan pendidikan pesantren dengan memperpadukan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.



Lokal Ibtidaiyyah PD Serang

Pada perintisan pendirian lembaga pendidikan sekolah Persis Pusat telah membuat jenjang pendidikan yaitu Ibtidaiyyah (setingkat sekolah dasar dengan lama belajar 6 tahun), Tajhiziyah (pendidikan 2 tahun setelah ibtidaiyyah), Tsanawiyah (pendidikan lanjutan setelah Tajhiziyah dengan lama belajar 4 tahun), Mu'alimin (lama belajar 2 tahun setelah Tsanawiyah), dan Aliyah (menerima lulusan Mu'alimin dengan lama belajar 3 tahun) (I. Djumhur dan H. Danasaputra, 183-1888). Adanya jenjang pendidikan sekolah Persis itu, sebagian besar diperuntukkan untuk mempejari Agama Islam, dengan tujuan utama pendidikan membentuk ulama Persis yang tangguh secara keilmuan.

Pada saat ini, karena Persis telah menjadi mitra pemerintah dalam pendidikan, maka pendidikan formal/sekolah Persis harus mengikuti pola pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pendidikan nasional. Berdasarkan atas pedoman pendidikan pemerintah tersebut, maka jenjang pendidikan sekolah Persis berubah sesuai dengan ketentuan pemerintah:

1. Pendidikan Pra-sekolah

Satuan pendidikan pada tingkat ini berbentuk satuan pendidikan taman kanak-kanak Islam yang diberinama "Raudlatul Athfal" (RA).

2. Pendidikan Dasar

Satuan pendidikan ini berbentuk pendidikan dasar sembilah (9) tahun yang dibagi menjadi empat tingkat yaitu pendidikan Ibtidaiyyah, Diniyah Ula, Tsanawiyah, dan Diniyah Wustha.

(a) Ibtidaiyyah

Tingkat pendidikan ini secara reguler umumnya diselenggarakan pada pagi hingga siang hari dengan memperpadukan mata pelajaran pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, sebagaimana madrasah Ibtidaiyyah yang di selenggarakan Departemen Agama.

(b) Diniyah

Tingkat pendidikan ini secara reguler umumnya diselenggarakan pada siang hingga sore hari dengan mengutamakan mata pelajaran pendidikan keagamaan, sebab peserta didik pada jenjang kelas yang paralel telah mendapat mata pelajaran pendidikan umum di Sekolah Dasar yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional.

(c) Tsanawiyah

Tingkat pendidikan ini secara reguler umumnya diselenggarakan pada pagi hingga sore hari dengan memperpadukan mata pelajaran pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, sebagaimana madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan Departemen Agama.

(d) Diniyah Wustha

Tingkat pendidikan ini secara reguler umumnya diselenggarakan pada siang hingga sore hari dengan mengutamakan mata pelajaran pendidikan keagamaan, sebab peserta didik pada jenjang kelas yang paralel telah mendapat mata pelajaran pendidikan umum di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional.

3. Pendidikan Menengah

Satuan pendidikan ini berbentuk pendidikan menengah tiga (3) tahun serta jenisnya ada dua yaitu pendidikan Mu'allimin dan Aliyah.

(a) Mu'allimin

Pendidikan ini umumnya diselenggarakan pada pagi hingga siang hari dengan memadukan mata pelajaran pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan profesi keguruan (paedagogik dan psikologi sebanyak empat jam pelajaran perminggu) dan pendidikan kejam'iyahan setara dengan Sekolah Pendidikan Guru yang pernah diselenggarakan oleh Departemen Nasional.

(b) Aliyah

Pendidikan ini diselenggarakan pada pagi hingga siang hari dengan memadukan mata pelajaran pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan profesi keguruan (paedagogik dan psikologi sebanyak dua jam pelajaran perminggu) dan pendidikan kejam'iyahan setara dengan Aliyah yang diselenggarakan Departemen Agama.

Untuk mendapatkan legalisasi dan pengakuan pemerintah terhadap lulusan lembaga-lembaga pendidikan di atas maka peserta didik pendidikan dasar dan menengah diikutsertakan dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional guna memperoleh Nilai Ebtanas Murni dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, lulusan Ibtidaiyyah Persatuan Islam meneruskan ke sekolah umum seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), lulusan Tsanawiyah dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum (SMU/SMK), dapat melanjutkan ke tingkat Mu'alimin/Aliyah dapat melanjutkan ke perguruan baik negeri maupun swasta. Para lulusan Mu'alimin dan Aliyah yang berprestasi biasanya ada program pendidikan beasiswa ke luar negeri terutama Universitas Al-Azhar (Mesir) dan Universitas Madinah (Arab Saudi).

Persatuan Islam Pusat telah membuka jenjang pendidikan perguruan tinggi yang pertama di Bandung, di jalan Ciganitri, yaitu STIPI (Sekolah Tinggi Persatuan Islam). Perguruan tinggi ini belum begitu banyak dikenal kalangan masyarakat Indonesia, hanya dikenal sebagian masyarakat Bandung dan interen Jam'iyah Persatuan Islam.

Persis Serang sejak awal pemerintahan Orde Baru telah melakukan konsolidasi untuk membuka lembaga pendidikan sekolah. Usaha ini berhasil membuka beberapa sekolah tingkat Madrasah dan Ibtidaiyah.

Madrasah Persis Serang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari, dengan menumpang di gedung sekolah milik pemerintah. Dengan ketabahan dan kerja keras, akhirnya Persis Serang berhasil mendirikan gedung sekolah sendiri yang berada di Kebaharan, tidak jauh dari Masjid Al-Manar.

Pada saat ini, Madrasah Ibtidaiyah telah melakukan kegiatan belajar pada pagi hari. Oleh karena itu, Madrasah Ibtidaiyah ini diubah menjadi Sekolah Dasar Persis Serang. Sekolah ini pada tahun ajaran 2002-2003 memiliki siswa sebanyak 750 orang. Oleh karena adanya permintaan dari jammah dan adanya tuntutan jaman dalam rangka penyebaran ide dan faham Persis melalui pendidikan, maka Persis Serang mendirikan sekolah lanjutan yaitu Madrasah Tsanawiyah dan

Madrasah Aliyah atau mualimin. pembangunan madrasah baru sedang dilaksanakan dengan dana yang diperlukan sekitar Rp. 200.000.000, yang berasal dari bantuan pemerintah sebanyak Rp. 30.000.000, dan dari alumni, warga, orang tua murid Rp. 70.000.000.

Secara keseluruhan pendidikan sekolah yang dikelola oleh Persis PD Serang terdiri atas sebuah Taman kanak-kanak Al-Quran, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh Persis Cabang kebaharan.

Pendidikan Persatuan Islam yang dikelola oleh PD Persis Serang terdiri atas:

1. Pesantren Persatuan Islam Nomor 55 di Kebaharan, memiliki luas tanah 1600m² dan luas bangunan 525m². Pesantren ini memiliki murid Ibtidaiyah dari kelas satu sampai kelas enam dengan jumlah 336 santri dengan jumlah tenaga pengajar (ustadz) 11 orang. Murid Tsanawiyah dari kelas satu sampai kelas tiga berjumlah 132 santri dengan 10 ustadz.
2. Pesantren Persatuan Islam Nomor 72 Padarincang, memiliki luas tanah 1500m² dan luas bangunan 560m². Pesantren ini memiliki murid untuk tingkat Ibtidaiyah berjumlah 88 santri dengan 12 orang ustadz. Murid Takhziyah peserta didik kelas A berjumlah 42 santri dengan 7 orang ustadz. Murid Tsanawiyah berjumlah 144 santri dengan 8 orang ustadz.
3. Pesantren Persatuan Islam Nomor 101 Rangkasbitung, memiliki luas tanah 1757m² dan luas bangunan 210m², Pesantren ini memiliki murid Takhziyah peserta didik kelas A sebanyak 32 santri dengan jumlah 6 orang ustadz. Murid Tsanawiyah sebanyak 94 santri dengan jumlah 6 orang ustadz.
4. Pesantren Persatuan Islam Nomor 37 Serang, Murid Ibtidaiyah berjumlah 350 santri sedangkan Murid Tsanawiyah berjumlah 100 santri.

Pendidikan sekolah yang dikelola Persis Serang pada awalnya diperuntukan khusus untuk anak-anak jamaah Persis. Namun demikian, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi maka sekolah persis pun terbuka untuk umum. Peserta didik atau siswa tidak dimonopoli dari lingkungan jam'iyah Persatuan Islam (Persis) akan tetapi bersifat terbuka. Artinya setiap muslim baik perorangan maupun dari jam'iyah lain dapat dengan bebas menjadi siswa di sekolah Persatuan Islam. Bahkan ada peserta didik yang berasal dari negara lain yang sengaja belajar di sekolah Persatuan Islam untuk menuntut ilmu keislaman.

Sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Persatuan Islam dapat dikategorikan moderen. Pendidikan pesantren dan sekolah Persatuan Islam memiliki kelebihan daripada pondok pesantren tradisional atau pendidikan formal

seperti SD, SMP, dan SMU. Pesantren Persatuan Islam memiliki kelebihan dengan adanya materi pelajaran umum seperti bidang studi bahasa, pengetahuan sosial, pengetahuan alam, dan ilmu umum lainnya. Materi keagamaan di pesantren Persatuan Islam lebih lengkap dengan mengajarkan hampir seluruh ilmu keagamaan seperti penguasaan Alquran, ilmu hadits, ilmu fiqih, ilmu falak, bahasa Arab, sejarah Islam, dan lain-lain.

Jumlah mata pelajaran agama dalam pendidikan Persatuan Persis Serang hampir seimbang dengan mata pelajaran umum. Dengan demikian, siswa dapat belajar agama dan sekaligus memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan cara ini diharapkan alumni menjadi insan yang memiliki rasa keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, serta menguasai ilmu dan teknologi maju.

Sementara itu, alumni ibtdaiyyah (setingkat SD) yang meneruskan ke pendidikan umum SMP atau alumni Tsanawiyah (setingkat SMP) yang meneruskan ke pendidikan umum ke SMU atau SMK dapat dengan mudah menyesuaikan pendidikannya. Sebaliknya, lulusan pendidikan umum dari SD ke Tsanawiyah atau dari SMP ke Mu'alimin (Aliyah) Persatuan Islam harus terlebih dahulu mengikuti program belajar Tazhijiyah selama setahun atau dua tahun siswa dapat menyesuaikan dengan mata pelajaran pesantren, sehingga tidak akan tertinggal dalam pelajaran yang diajarkan oleh ustadz.

Dewasa ini, kesadaran masyarakat baik anggota, simpatisan, dan masyarakat umum lainnya untuk mempesantrenkan putra-putrinya ke Persatuan Islam amat kentara. Semua itu merupakan motivasi para orang tua agar anak-anaknya lebih menguasai tentang keislaman, ingin menerapkan ajaran Islam yang benar-benar berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Adanya animo masyarakat untuk memasukan anaknya ke pesantren dan atau sekolah Persis serang sangat menggembirakan. Pada sisi lain, terdapat masalah terutama adanya keterbatasan siswa dalam penguasaan agama. Hal ini sangat terasa pada sekolah lanjutan, seperti madrasah Tsanawiyah ataupun Madrasah Aliyah. Keadaan ini mempengaruhi dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas proses pendidikan secara memadai. Pada gilirannya akan menyulitkan peningkatan mutu keluaran atau lulusan.

Penyelenggaraan pendidikan, selain adanya siswa yang belajar juga perlu adanya guru sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Pada pesantren dan sekolah Persis Serang, unsur pengajar juga mengalami permasalahan. Pengajar jumlahnya relatif sedikit yang mau bekerja dengan keridhoan dan keikhlasan yang didasari pengabdian kepada Allah. Tenaga pendidik Raudlatul Athfal (RA), Ibtidaiyyah, dan Tsanawiyah bisa menggunakan para lulusan

atau alumni dari Mu'alimin atau Aliyah yang telah dipersiapkan untuk mengajar. Adapun pendidik untuk Aliyah dan Mu'alimin biasanya mereka yang sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi setidaknya telah mengenyam perguruan tinggi baik Strata Satu (S1) maupun alumni Diploma (D1-3). Hal tersebut ditempuh dalam kerangka mewujudkan alumni yang berkualitas, baik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk terjun ke masyarakat menjadi pendidik atau guru di pengajaran.

Persatuan Islam (Persis) menyadari bahwa untuk tenaga pendidikan berdasarkan kualifikasi formal-profesional yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih-lebih dalam perkembangan hubungan sosio-kulturil antar bangsa makin mendunia, jam'iyah Persatuan Islam kesulitan untuk mengangkat dan menempatkan tenaga kependidikan yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Pada saat ini, tenaga pendidikan umumnya tenaga sukarela dan kalaupun mendapat bayaran yang sangat minim. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki Persis Serang.

Oleh karena itu, dicarikan jalan lain untuk mengatasi semua itu, di antaranya dengan kesediaan dari anggota dan simpatisan jam'iyah Persatuan Islam untuk menyisihkan infak dan sodaqohnya, selain itu, ada dana alokasi bantuan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan beasiswa dari pemerintah yang jumlahnya belum memadai. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dapat dipenuhi sebagian dengan mencari dan mendapatkan donatur dari luar negeri terutama negara-negara Islam Timur tengah.

Selain tenaga pendidik juga dirasakan adanya ketimpangan antara kemampuan calon dasar siswa dengan target yang diinginkan. Dengan berorientasi kepada penepatgunaan landasan, fungsi, dan tujuan pendidikan Persatuan Islam terhadap masukan calon peserta didik satuan kependidikannya, karena keterbatasan jumlah masukan sesuai dengan minat serta sikap diri dan orang tuanya, maka sulit bagi tenaga kependidikan pesantren untuk melakukan penyaringan terhadap calon peserta didik yang memiliki kemampuan dan minat memadai untuk mengikuti pendidikan pesantren Persatuan Islam. Kondisi masukan demikian adanya akan berakibat dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas proses pendidikan secara memadai. Kelak pada gilirannya akan menyulitkan peningkatan mutu keluaran atau lulusan satuan pendidikan pesantren Persatuan Islam.

Upaya yang dilakukan oleh Persatuan Islam Serang dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk meningkatkan kualitas anak didiknya yaitu dengan mengawasi proses pengajaran. Pengawasan terhadap asatidz (para tenaga pengajar) secara berkesinambungan dalam penyusunan

analisis materi pengajaran, penyusunan rencana pengajaran harian (satuan pembelajaran), dan penyusunan agenda harian. Pengawasan pun dilakukan terhadap para asatidz ketika mengajar, sejauhmana para asatidz dapat mengaktifkan peserta didik dengan menggunakan variasi model-model dan metode pengajaran. Langkah-langkah ini dilakukan dalam kerangka meningkatkan kualitas pengajaran yang berdampak pula terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Persatuan Islam.

Selain itu upaya peningkatan kualitas pendidikan ditunjang juga dari beberapa faktor lainnya seperti sarana-prasarana dan administrasi pendidikan. Upaya pendidikan memerlukan pemahaman dan penerapan prinsip serta teknologi manajemen pendidikan. Kadangkala penerapan ini akan menimbulkan kesulitan karena adanya heterogenitas kemampuan dasar pendidikan dan kurangnya latihan penerapan manajemen pendidikan pada pimpinan satuan pendidikan Pesantren Persatuan Islam. Kadaan ini diatasi dengan jalan melengkapi buku kepustakaan dan nara sumber untuk keperluan penataran dan latihan manajemen pendidikan. Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian manajemen pendidikan yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan oleh para mufattisy (pengawas) bidang tarbiyah pimpinan pusat persatuan Islam. Serta diupayakan berdirinya Pusat Sumber Belajar (learning resourch center) yang dijadikan fasilitas penyelenggaraan penataran dan pelatihan dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan pada model Pesantren Terpadu Persatuan Islam.

D.4.1 Bidang Dakwah (Tarbiyyah)

Bidang pendidikan (tarbiyyah) dan dakwah (tabligh) saling berkaitan, kedua garapan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal yang dilaksanakan oleh jam'iyah Persatuan Islam tidak terlepas dari dakwah, karena pada prinsipnya memberikan materi yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Alquran dan As-sunnah secara murni. Begitu pula, ketika sedang dilancarkan tabligh atau dakwah baik di lingkungan interen maupun di luar jam'iyah maka materi dakwah tidak terlepas dari pemberian materi yang berkaitan dengan pendidikan tauhid, ibadah, dan ahlak.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Persatuan Islam adalah nama jam'iyah yang bergerak dalam keorganisasian pendidikan, tabligh, dan kemasyarakatan yang berlandaskan Alquran dan As-sunah. Tentunya dengan landasan tersebut mengisaratkan bahwa Persatuan Islam mendidik dan mendakwahi ke dalam agar para anggota dan calon anggota (simpatisan) melaksanakan ketaatan kepada agama Islam menurut tuntunan Alquran dan As-

sunah. Serta membentuk para anggotanya menjadi tha'ifatun mutafaqqihuna fi'd-din (sekelompok yang memperdalam agama). Adapun ke luar jam'iyyah mendidik dan mengajak kaum muslimin agar kembali kepada tuntunan Alquran dan As-sunah. Lebih jauhnya mengajak kepada para anggota dan umat Islam umumnya ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi oleh Allah swt.

Jam'iyyah Persatuan Islam bersifat mujaddid (pembaharu) dalam pemikiran ke-Islaman dan penerapan ajaran Islam. Para pembaharu (mujaddid) ini telah dijanjikan oleh Allah swt. akan bangkit setiap abad guna mengangkat umat Islam pada derajat kemuliaannya, mengembalikan mereka kepada Alquran dan As Sunnah. Jadi kemuliaan umat Islam itu bukan dilihat dari pemikiran dan pengamalan yang serba moderen meninggalkan atau menyisihkan aturan Tuhan, akan tetapi sebaliknya, umat Islam akan mulia dan bangkit jika mereka kembali memegang teguh Alquran dan As Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

Umat Islam tidak akan tersesat dan jatuh ke lembah kehinaan selama memegang teguh (istiqomah) mengamalkan Alquran dan Assunnah, oleh karena itu, segala aturan yang tidak menurut tuntunan Alquran dan As Sunnah seperti mengikut imam dan madzhab dengan membuta, sehingga membawa mereka kedalam jumud (beku atau tenggelam kebodohan), taqlid (menerima aturan agama secara membabi buta tanpa memperhatikan dalilnya baik dalam Alquran maupun As Sunnah atau memberi kuasa kepada seseorang mengikuti ulama mujtahid, mengikuti tradisi), khurafat (cerita yang diada-adakan atau suatu keyakinan akan dapat memberikan sesuatu atau hadiah kepada yang telah meninggal dunia), bid'ad (membuat aturan dalam agama dengan menambah-nambah seolah-olah aturan dari Allah swt. dan Rasulnya atau membuat aturan yang baru dalam urusan agama), dan syirik (menyekutukan Tuhan atau mermbuat sembah-sembahan lain selain Allah swt.), telah mengakibatkan kemunduran dan kehancuran umat Islam. Oleh karena itu, pengembalian umat Islam pada kejayaan dan kemuliaan adalah menjadi keharusan untuk menyehatkan umat Islam dari paham-paham yang sesat dan keliru, sebab umat dengan agama yang sehat tidak mungkin menjadi permainan siasat, tapi akan membawa mereka pada masyarakat sejahtera dan bahagia.

Persatuan Islam yang resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, dari mulai berdiri hingga kini, dan yang akan datang tetap konsisten untuk menegakkan dakwah yang berlandaskan Alquran dan As Sunnah. Dalam dakwahnya kepada umat Islam mengajak agar dapat menjaga diri dari pengaruh atau godaan yang datang dari interen (dalam) dan eksteren (luar). Pengaruh dari

luar atau eksteren adalah pengaruh yang bergelombang yang datanganya dari orang kafir dan orang-orang musyrik, dalam Alquran digambarkan gelombang yang datanganya dari setan, orang kafir, dan musrik akan menghantam baik dari sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Adapun pengaruh dari dalam atau interen adalah pengaruh yang disebabkan dari dalam sendiri yaitu dengan banyaknya peribadahan yang tidak jelas aturan atau dalilnya baik dalam Alquran maupun As-sunnah.

Umat Islam dalam peribadahan sudah diliputi dengan kekotoran bak jamur yang mengotori tembok atau pakaian, semua itu harus dibersihkan, karena jika tidak, akan mencelakakan dirinya sendiri. Cara membersihkannya yaitu dengan kembali kepada Alquran dan As-sunnah, tidak ada kekotoran dalam ibadah yang disebabkan oleh tidak bersihnya tauhid yaitu yang dikenal dengan penyakit TBC (Taklid, Bid'ah, Churafat). Para da'i atau mubaligh Persatuan Islam berusaha sekuat tenaga memerangi penyakit TBC ini.

Seperti telah dijelaskan di atas yang dimaksud dengan "taqlid" adalah menerima aturan agama secara membabi buta tanpa memperhatikan dalilnya baik dalam Alquran maupun As-sunnah atau memberi kuasa kepada seseorang mengikuti ulama mujtahid, tradisi. Sebenarnya Islam sudah melarang kepada umatnya untuk mengikuti seseorang termasuk di dalamnya ulama jika apa yang dilontarkannya atau apa yang diperbuatnya ternyata tidak ada keterangan atau dalilnya dalam Alquran dan As-sunnah, Islam tidak boleh mengikuti aturan agama dari madzhab para ulama namun jika madzhab itu digunakan sebagai pembandingan dalam mengkaji ilmu boleh-boleh saja, akan tetapi tetap yang menjadi pegangan adalah Alquran dan As-sunnah bukan paham ulama, madzhab, ustadz, atau tradisi dalam keagamaan. Bid'ah adalah membuat-buat aturan baru atau menambah mengurangi dalam aturan agama. Perlunya setiap muslim melaksanakan ibadah mengetahui dalilnya adalah untuk menghindarkan diri dari bid'ah, jika ibadah kita itu hanya mengikuti ulama, ustadz, madzhab, hal ini akan mudah tergelincir kepada perbid'ahan. Khurafat artinya cerita yang diada-adakan atau suatu keyakinan dapat memberikan sesuatu atau hadiah kepada orang yang telah meninggal, misalnya dengan membaca surat Alfatihah sekian kali di atas kubur atau di masjid kepada yang telah meninggal akan membantu meringankan yang mati atau akan melapangkan si mati.

Saat ini penyakit TBC (Taklid, Bid'ah, Churafat) di umat Islam Indonesia sangat kentara dan sepiantas susah untuk dikikis atau dihilangkan dari peribadahan umat Islam, namun dakwah yang kontinyu, dan tetap konsisten disertai kesabaran dalam amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan/kesesatan), insya Allah, Allah akan memberi jalan dan kemenangan bagi Umat Islam. Sejarah membuktikan umat Islam yang tenggelam dalam taqlid,

khurafat, bid'ah, syirik, dan jumud telah melemahkan dan membuat umat Islam mengalami kehancuran, oleh karena itu, jika umat Islam ingin meraih masa kejayaannya kembali seperti di jaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin obatnya sangat mudah yaitu kembali kepada Alquran dan As-sunnah, hilangkan semua taqlid, bid'ah. khurafat, kemusyrikan, jumud, serta tradisi-tradisi keagamaan yang tidak ada dalilnya dalam Alquran dan As-sunnah.



Masjid Al Manar
Salah satu sarana untuk menyampaikan da'wah

Selanjutnya perlu diketahui apa yang menjadi tujuan dakwah Jami'yyah Persatuan Islam Serang. Hal itu meliputi tujuan dakwah khusus dan umum. Tujuan dakwah umum Persatuan Islam Serang adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan dakwah secara lisan, tulisan, dan amal perbuatan dalam masyarakat yang sejalan dengan Alquran dan As-sunnah
2. Melakukan amar ma'ruf nahyi munkar dalam segala ruang dan waktu, membela dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan lawan-lawan Islam dengan cara hak dan ma'ruf yang sesuai dengan tuntunan alquran dan As-sunnah
3. Menghidupkan dan memelihara ruhul jihad dan ijtihad dalam kalangan para anggota khususnya dan umat Islam umumnya
4. Membasmi munkarat, bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid, dan syirik dalam lingkungan anggota khususnya dan umat Islam umumnya
5. Memberikan jawaban dan perlawanan terhadap tantangan aliran yang mengancam hidup ke-Islaman demi tegak dan kokohnya agama Allah
6. Mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan segenap organisasi Islam dan lainnya di Indonesia dan seluruh dunia untuk menuju terwujudnya bun-yanul-Islam

Adapun tujuan dakwah khusus adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan membina para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan Syariat Islam dengan semestinya, penuh tanggung jawab, menjadi uswatun khasanah bagi keluarga dan masyarakat sekelilingnya, baik dalam aqidah, ibadah, dan muamalah
2. Membentuk para anggota menjadi ulama, zuama, ashabun, dan hawaryyun Islam yang mampu bertindak selaku muballigh dan muballighat dengan jalan memperdalam pengertian dan memperkaya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum syara dan ajaran Islam
3. Mendidik dan membina para anggota agar mengadakan, memelihara, dan memakmurkan masjid, mushalla, wakaf, dan zakat dengan jalan memimpin beribadatan baik badaniyyah dan atau maliyyah umat Islam menurut tuntunan Alquran dan As-sunnah, untuk membuktikan kehidupan ruhul iman dan taqwa
4. Mendidik dan membina para anggota agar mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk menanamkan, memperdalam dan mengokohkan pengertian aqidah, ibadah, muamalah, dan ahlak Islam
5. Mendidik dan membina para anggota agar mengadakan dan mengembangkan perpustakaan Islam di pusat pendidikan yang diselenggarakan oleh Jam'iyyah
6. Mendidik dan membina para anggota agar melakukan penelitian ilmiah ke-Islaman dalam rangka memelihara dan mengembangkan ruh ijtihad
7. Membina para anggota agar mengadakan dan memperkaya kepustakaan Islam dengan jalan mengadakan penerbitan-penerbitan keagamaan untuk memperluas tersebarnya faham dan keyakinan wajibnya kembali kepada Alquran dan As-sunnah
8. Mendidik dan membina para anggota agar mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang sejalan dengan tujuan Jam'iyyah dan tidak menyimpang dari tuntunan Alquran dan As-sunnah

Selain materi, landasan, dan tujuan dakwah tidak kalah pentingnya yaitu para asatidz, da'i, atau muballigh. Syarat untuk menjadi da'i di persatuan Islam tidak sulit yaitu memiliki sifat *sidiq* artinya benar; menyampaikan kebenaran yang datang dari Alquran dan As-sunnah, sifat *amanah* artinya dapat dipercaya; tidak pernah berkhianat terutama kepada Alquran dan As-sunnah, sifat *fathonah* artinya pandai, sifat *tabligh* artinya mau menyampaikan ilmu yang dikuasainya. Adapun syarat usia menjadi muballigh seperti remaja dan dewasa tidak menjadi tolok ukur yang penting sudah akil baligh.

Seorang da'i biasanya muncul karena pengakuan dari masyarakat baik interen jam'iyyah maupun eksteren, beda lagi dengan seorang ustadz yang memang harus memiliki landasan ilmu berdasarkan pendidikan formal misalnya

untuk menjadi ustadz di Tsanawiyah minimal harus jebolan dari Mu'alimin, begitu seterusnya. Da'i atau mubaligh yang sudah diakui oleh lingkungan tempat tinggalnya atau di masjid tempatnya beraktivitas, jika ingin menjadi mubaligh yang terdaftar di PD (Pimpinan Daerah) misalnya di Serang, maka ia akan diutus oleh PJ (Pimpinan Jamaah) atau PC (Pimpinan Cabang) untuk mengikuti Tamhidul Muballighin (pendidikan atau pelatihan untuk persiapan menjadi muballigh). Lulus dari pendidikan Tamhidul Muballighin maka secara otomatis akan terdaftar sebagai khotib, da'i, mubaligh di Pimpinan Daerah (PD) Serang.

Latar belakang pengetahuan agama para da'i memang tidak sama, ada yang berawal dari pendidikan formal seperti Tsanawiyah, Mu'alimin, Aliyyah, dan IAIN, ada juga dari pendidikan umum namun pernah mengikuti pesantren Diniyah, Pesantren Ahad, Kursus Mubaligh, bahkan ada juga yang hanya beraktivitas dari masjid ke masjid mengikuti pengajian-pengajian, dan menimba ilmu langsung dari qoyyimul masjid.

Setiap masjid-masjid yang dikelola oleh Jam'iyah Persatuan Islam yang jumlahnya di Indonesia mencapai ratusan hingga ribuan, para da'i atau khotib yang akan mengisi salat jumat, salat id, dan pengajian semuanya sudah terdaftar di Pimpinan Daerah (PD) masing-masing. Dan setiap dai atau mubaligh Persatuan Islam, ia sudah menjadi anggota tetap Jam'iyah Persatuan Islam yang memiliki Kartu Anggota KTA) dan Nomor Induk Anggota (NIAT). Hal ini adalah untuk koordinasi dan pertanggung jawaban dari bawah ke atas.

Pembinaan kepada Jamaah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pengajian-pengajian baik untuk tingkat Pimpinan daerah sampai pada tingkat Pimpinan Jamaah. Untuk peserta pengajian biasanya bersifat umum artinya selain interen jamaah masyarakat umum pun diperbolehkan mengikuti pengajian tersebut. Pengajian yang diselenggarakan oleh PD untuk persis dilakukan pada setiap malam sabtu bada salat Isya dengan materi tafsir. Persistri mengadakan pengajian setiap hari senin pukul sembilan pagi, dengan materi umum. Adapun pengajian untuk pemuda dan pemudi Persatuan Islam diselenggarakan pada senin malam bada salat isya.

Pengajian yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Kasemen dilaksanakan setiap hari Jumat pukul dua siang, Pimpinan Cabang Curug mengadakan pengajian pukul sembilan pagi setiap hari selasa untuk umum dan hari Jumat pukul setengah delapan dengan materi tafsir, Pimpinan Cabang Kasemen mengadakan pengajian setiap hari Jumat pukul dua siang untuk umum,

sedangkan Pimpinan Cabang Padarincang melaksanakan pengajian setiap hari Jumat pukul dua siang untuk persis dan hari minggu pukul delapan pagi untuk persistri. Pengajian yang diselenggarakan Pimpinan Jamaah Cimuncang dilaksanakan setiap malam Sabtu bada salat Isya.

Pengajian yang menyangkut keorganisasian di Pimpinan Daerah Serang diselenggarakan tiga bulan sekali untuk persis setiap hari jumat minggu ke-lima, adapun untuk persistri diselenggarakan pada setiap hari minggu pada minggu ke-lima, adapun pembinaan masalah kejam'iyahan dilaksanakan secara temporer.

C.4.1 Bidang Politik

Persis Serang sebagai bagian Persis Pusat tidak melakukan politik praktis, tetapi melaksanakan kebijakan politik berdasarkan konsesus Persis Pusat. Dalam perjalanan sejarah Persis bukanlah organisasi politik, tetapi organisasi sosial yang ingin memperbaiki kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu Persis menyalurkan aspirasi politiknya melalui Masyumi. Setelah Masyumi dibubarkan, maka Persis pindah dibawah Parmusi. Pada masa Orde Baru, Persis berada di bawah naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada masa reformasi sekarang ini, Persis tidak melakukan politik praktis karena ingin bergerak dalam bidang kemasyarakatan semata. Persis tidak melarang anggotanya untuk menjadi anggota parpol. Oleh karena itu, sekarang banyak anggota Persis yang menyalurkan aspirasi politiknya ke dalam Partai Bulan Bintang (PBB).

Persis mengeluarkan kebijakan yang tidak menentang atas pengaruh kebudayaan di dalam melaksanakan ajaran agama, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam.

C.4.3 Bidang Sosial

Persis Serang dengan dana seadanya berusaha melaksanakan kegiatan untuk menolong sesama melalui kegiatan sosial, antara lain khitanan, bantuan bencana alam, bantuan dana pembangunan sarana ibadah, beasiswa (dana dari orang tua), dan qurban.

C.4.4 Bidang Usaha Ekonomi

Untuk menggerakkan organisasi diperlukan dana. Penggalangan dana Persis terutama dari infak para anggota dan jamaah. Selain itu, Persis Serang pun membuat usaha mandiri yang dapat menghasilkan dana, yaitu melalui organisasi ekonomi yang disebut *Amilin*.

Amilin ini pada awalnya adalah gerakan usaha mengumpulkan dana untuk membeli tanah (untuk organisasi). Gerakan usaha ini bergerak dalam industri kecil seperti kerajinan sepatu dan sandal.

Usaha/gerakan ekonomi ini mengalami kehancuran karena peristiwa krisis ekonomi dengan adanya pembagian sembako, terutama beras dan gula murah. Jamaah yang mendapat modal usaha dari amilin ternyata menggunakan uang tersebut untuk membeli beras dan gula murah tersebut, sehingga akhirnya mereka tidak dapat membayar atau mengembalikan kembali uang itu kepada amilin (macet). Akibatnya kondisi Amilin pun hancur.

BAB IV

P E N U T U P

Persatuan Islam (Persis) merupakan salah satu organisasi Islam yang ingin mengadakan pembaharuan khususnya dalam ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah Rasul. Organisasi ini, walaupun pengikutnya tidak terlalu banyak tetapi telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persis dapat dikatakan sebagai organisasi yang mewakili sebagian besar umat Islam Indonesia yang ingin mengadakan pembaharuan terhadap ajaran Islam.

Pembaharuan Islam sebenarnya adalah sebuah upaya reform atau pembaharuan dalam agama akibat kehidupan masyarakat muslim yang banyak menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, istilah “Pembaharuan Islam” digunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui dan memperbaiki cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Gerakan ini, menurut Ibnu Taimiyyah (1263-1328) disebut muhyi salaf, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran sahabat Rasul dan Tabiin yang anti kemusrikan dan bidah dengan berpedoman pada Alquran dan As Sunnah.

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia telah muncul sejak abad ke-19 di Sumatera Barat. Gerakan ini dipelopori oleh ulama-ulama Minang, seperti Haji Mishin yang belajar di Arab (Muchlas) dan bersentuhan dengan gerakan Wahabi yang berusaha meluruskan dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Alquran dan As Sunnah. semangat Wahabi ini dibawa oleh ulama Minang ke daerah asalnya di Sumatera Barat.

Organisasi Persis yang didirikan di Bandung tahun 1923, telah berhasil berkembang ke seluruh Indonesia dan salah satu cabang Persis berada Kabupaten Serang. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain yang berdiri di Serang, maka organisasi Persis Serang terbentuk secara perlahan dengan melalui

proses yang panjang. Cikal bakal lahirnya Persis Serang tampak dengan hadirnya seorang ulama yang bernama Ahmad Maryani Ismail atau lebih dikenal dengan nama Ahmar Ismail, seorang ulama kelahiran Kampung kebaharan Al Manar Serang, Banten.

Pada tahun 1952, Ahmad Maryani mulai melakukan kegiatan pembaharuan pada masyarakat Serang, karena saat itu umat Islam Serang masih banyak yang hanyut dalam arus praktek campuran antara unsur Islam dan unsur pra-Islam. Kegiatan pembaharuan ini banyak mendapat hambatan dari masyarakat yang kurang mengerti dan masih kuatnya adat yang membelenggu masyarakat. Selama dua tahun, perjuangannya menegakkan syariat Islam berdasarkan Alquran dan As Sunnah hanya memperoleh hasil yang sangat jauh dari harapan, bahkan sebaliknya justru tersebar isu-isu yang menyebutkan Ahmad Maryani sebagai seorang Wahabi.

Tindakan dan kegiatan Ahmad Maryani yang berusaha memberantas bid'ah, syirik, dan taqlid ternyata bertentangan dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat yang masih melakukan kegiatan tersebut yang dianggapnya sesuai dengan agama Islam tidak menyukai ajaran dan kehadiran Ahmad Maryani. Sebagian masyarakat menganggap ajaran Ahmad Maryani sebagai ajaran yang salah dan menyimpang, karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak aneh apabila dalam setiap kegiatan pengajian yang dilakukan Ahmad Maryani sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, seperti dicemooh, dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu. Adanya kejadian-kejadian tersebut tidak menyurutkan dan membuat gentar semangat pergerakan kembali kepada Alquran dan As Sunnah.

Pada pertengahan tahun 1950-an, jamaah pengajian Ahmad Maryani sudah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh daerah kecamatan yang ada di Serang. Dengan melihat keadaan jama'ah dan dirasakan cukup untuk membentuk sebuah organisasi maka pada tahun 1956 Ahmad Maryani mempelopori berdirinya Persatuan Islam Serang sebagai bagian dari Persis Pusat dengan nama resmi Persatuan Islam Cabang Nomor 55 Serang.

Persatuan Islam (persis) cabang Nomor 55 Serang yang baru didirikan ini dipimpin oleh Ustad Ahmad Maryani. Pada awal berdirinya Persis Serang memiliki empat daerah yaitu: Serang, Padarincang/Gunung Gombang, Baros, dan Kasemen. Persis Cabang yang cukup maju adalah Kasemen dan Padarincang, karena kedua Persis cabang ini telah memiliki sekolah.

Sebagai bagian dari sebuah organisasi, sudah barang tentu Persis Serang menjalankan tujuan dan cita-cita Persis Pusat yang diwujudkan dalam Rencana Jihad sebagaimana tercantum dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persis serta memperhatikan Keputusan Directeur Van Justitie (Badan Kehakiman) Nomor: A 43/30/20 tanggal 24 Agustus 1939, maka ditetapkanlah Nizham Jam'iyah Persatuan Islam berupa Qanun Asasi (Anggaran Dasar) dan Qanun Dakhili (Anggaran Rumah Tangga) terutama yang tercantum dalam Bab II pasal satu (1.).

Perkembangan Persis Serang sejak tahun 1956 sampai masa dekade awal pemerintahan Orde Baru kurang dapat berkembang dengan baik. Pada masa Orde Lama dengan adanya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin telah membelenggu gerakan Persis Serang. Pada masa itu, komunislah yang mempunyai ruang gerak yang lebih luas karena lobi mereka di dalam pemerintahan pusat.

Kebangkitan Persis Serang atau lebih tepatnya mulai leluasanya kegiatan Persis Serang terjadi pada tahun 1980-an dan terutama setelah Persis Serang dipimpin oleh H. Syafei. Oleh H. Syafei, Persis Serang berusaha diaktifkan kegiatannya dengan menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari Persis Serang seperti Pemuda Persis, dan Persistri (Persatuan Islam Istri). Pada saat ini, Persistri Serang telah memiliki beberapa cabang antara lain Persistri Cabang Serang, Padarincang, Baros, dan Kasemen.

Persis Serang masa kepengurusan H. Syafei ini mengalami perkembangan yang pesat dengan aktif melakukan kegiatan utama untuk memperkuat anggota jamaah dan meningkatkan jumlah jamaah. Selain itu, sesuai dengan tuntutan jaman Persis Serang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi.

DAPSTAR PUSTAKA

- Atja, *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*, seri Monografi no. 5, IKAM, Jakarta: 1972
- Aly, M. Ishmet, *TT Permata hati Ahmar Ismail*.
- Cortesao, Armando., *The Suma Oriental of Tome Pires*, London, The Haleluyt, 1964
- Djauhari, *Ulama Kunci Pergerakkan Perjuangan dan Pembangunan Bangsa*, Kumpulan karangan Banten Menuju Masa Depan, Serang, 2000
- Djumhur I. dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, Bandung, Ilmu, 1976
- Ekadjati, Edi S., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat*, Depdikbud, Proyek IDKD, Jakarta: 1981/82
- dkk., *Sejarah Pendidikan Jawa Barat Sampai dengan Tahun 1950*, Jakarta, 1986.
- Falah, Anwar., *Tinjauan Konsepsi Seni Bangunan Istana Peninggalan Masa Islam di Kesultanan Cirebon Dalam Konteks Kesenambungan Budaya*, Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, Depdikbud Jakarta.
- Kutoyo, Sutrisno., *Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung ke Batavia*, IDSN, Jakarta, 1986)
- Lasmiyati dkk, *Peninggalan Sejarah di Banten Lama, Kabupaten Serang*, Bandung, BKSNI, 1999/2000
- Marwati D.P., *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Pustaka, 1992
- Michrob, Halwany dkk., *Catatan Masa lalu Banten*, Serang Banten, 1993.
- Mughri, Syarif A., *A. Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980,
- Puar, Yusuf Abdullah, *Muhammad Natsir 70 Tahun; Kenang-kenangan dan perjuangan*, Jakarta, Pustaka Antara, 1978.
- Tjandrasasmita, Uka., *Pasai Dalam Dunia Perdagangan*, Kumpulan Makalah Diskusi Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra, Depdikbud Jakarta.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1999
- Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan*, 3, Jakarta, Kanisius, 1987.
- Kosoh S., dkk. *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Depdikbud, Jakarta, 1994:158-160).

